

28. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan ke dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

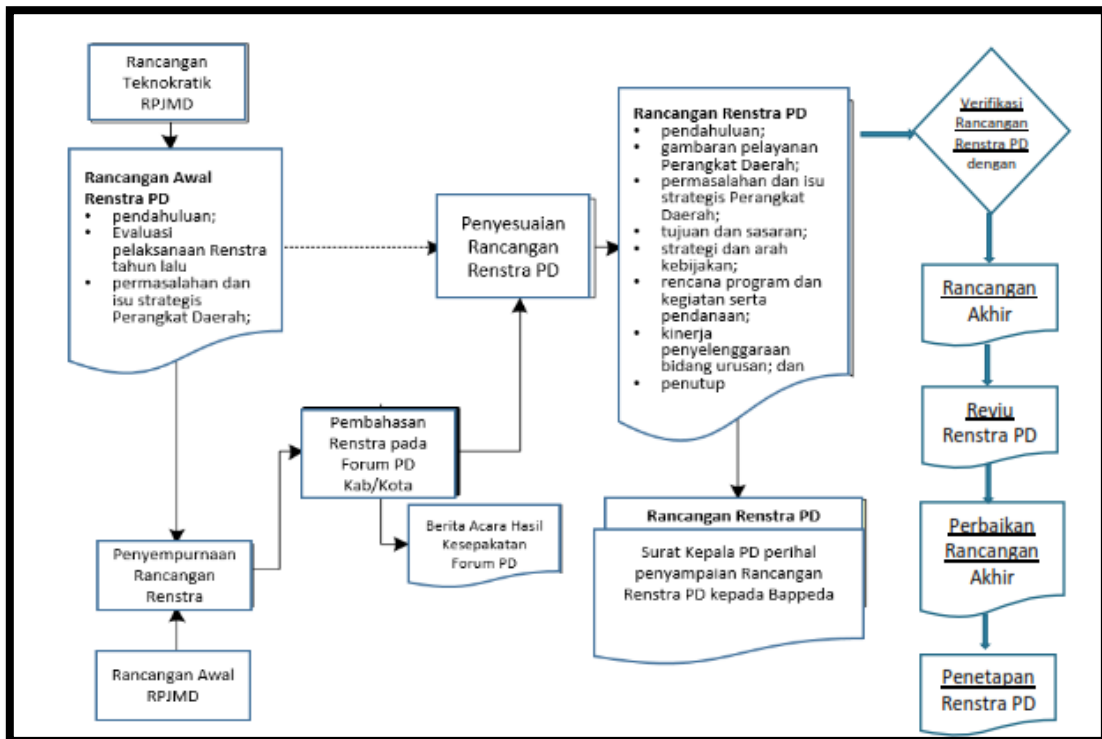
Sebagai salah satu fungsi dari perangkat daerah, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan perangkat daerah lainnya dan seluruh masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijamin melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh perangkat daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Sukorejo merupakan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Sukorejo 5 (lima) tahun ke depan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya. Dan mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2025-2029, sebagai penjabaran dari visi misi Walikota Terpilih. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Sukorejo merupakan bagian utuh dari manajemen pembangunan Pemerintah Kota Blitar. Renstra Kecamatan Sukorejo memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan isu dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan 2025-2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Kecamatan Sukorejo pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Adapun tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Tahapan / Proses Renstra



1. Persiapan penyusunan, meliputi:
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Kecamatan Sukorejo dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan mencakup:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Pelayanan Kecamatan Sukorejo;
 - c. Permasalahan dan isu strategis Kecamatan Sukorejo;
 - d. Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Sukorejo berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - e. Perumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sukorejo untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Kecamatan Sukorejo; dan
 - f. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
3. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Sukorejo disusun dengan menyempurnakan Renstra Kecamatan Sukorejo
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Rancangan Renstra yang telah disusun dibahas dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan *stakeholder* Kecamatan Sukorejo yang bersangkutan.

5. Perumusan Rancangan Akhir; hasil rumusan Rancangan Renstra yang dibahas dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kemudian disampaikan oleh Camat kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi untuk memastikan rancangan Renstra Kecamatan Sukorejo telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.

6. Penetapan

Kecamatan Sukorejo mengemban misi ke-3 (tiga) yaitu mewujudkan pembangunan kota blitar yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang berbasis smart governance melalui sasaran strategis untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik maka tujuan strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar adalah peningkatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan dan peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut, serta mengingat tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016, yaitu sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, Renstra Kecamatan Sukorejo Kota Blitar akan menjelaskan strategi kebijakan dalam memberikan pelayanan kewilayahan untuk kurun waktu lima tahun mendatang. Selain itu, Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Sukorejo setiap tahunnya.

Keterkaitan Renstra Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025-2029 dengan dokumen-dokumen Perencanaan lainnya:

- a. Keterkaitan Renstra dengan RPJMN :

Renstra disusun berdasarkan RPJMN. Setiap kementerian/lembaga atau perangkat daerah wajib menyelaraskan Renstra mereka dengan RPJMN, memastikan bahwa tujuan dan prioritas pembangunan di tingkat nasional tercermin dalam kegiatan dan program di tingkat instansi atau daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

- b. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur :

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) provinsi dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah memiliki hubungan yang erat. RPJMD berfungsi sebagai dokumen induk yang menjadi acuan bagi penyusunan Renstra. Renstra, pada gilirannya, merupakan penjabaran lebih rinci dari RPJMD dalam lingkup masing-masing Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 276 ayat (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Pembangunan daerah kabupaten/kota. Sehingga secara teknis Renstra akan selaras dengan RPJMD Kota dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah

Kota/Kabupaten dapat mendukung pembangunan provinsi Jawa Timur. Dengan demikian Renstra dapat dipastikan selaras dan mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Jawa Timur. Dimana Tujuan Renstra disandingkan dan diselaraskan dengan Nawa Bhakti Satya sebagai misi dalam naskah RPJMD Provinsi Jawa Timur.

c. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Blitar:

Renstra berpedoman pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan:

- 1) Renstra sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJMD.
- 2) Renstra memuat visi, misi arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh OPD yang berkoordinasi dengan BAPPEDA.

d. Keterkaitan Renstra dengan Renstra K/L :

Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga). Berikut adalah beberapa aspek keterkaitan antara keduanya:

1. Keselarasan Tujuan:

Renstra perangkat daerah dan Renstra K/L harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah.

2. Keterpaduan Program:

Program-program yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus terpadu dengan program-program yang tercantum dalam Renstra K/L.

3. Konsistensi Kebijakan:

Kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam Renstra K/L.

4. Sinkronisasi Kegiatan:

Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus sinkron dengan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra K/L.

Dalam menyusun Renstra perangkat daerah, perlu mempertimbangkan Renstra K/L untuk memastikan keterkaitan dan keselarasan antara keduanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dan nasional.

Beberapa manfaat keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Renstra K/L adalah:

1. Peningkatan Koordinasi:

Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Renstra K/L dapat meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah dan K/L.

2. Peningkatan Efisiensi:

Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Renstra K/L dapat meningkatkan efisiensi pembangunan daerah dan nasional.

3. Peningkatan Efektivitas:

Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Renstra K/L dapat meningkatkan efektivitas pembangunan daerah dan nasional

e. Keterkaitan Renstra Kecamatan Sukorejo dengan Renstra Provinsi

Renstra kabupaten/kota harus mengacu pada RPJMD provinsi dan juga Renstra provinsi. Hal ini memastikan adanya keselarasan program dan kegiatan pembangunan antara tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

f. Keterkaitan Renstra dengan Renja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

Renja (Rencana Kerja) memiliki keterkaitan yang erat dengan Renstra (Rencana Strategis). Berikut adalah beberapa aspek keterkaitan antara keduanya:

1. Penjabaran Renstra:

Renja merupakan penjabaran dari Renstra yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan.

- 2. Keterpaduan Program:
Program-program yang tercantum dalam Renja harus terpadu dengan program-program yang tercantum dalam Renstra.
- 3. Konsistensi Sasaran:
Sasaran-sasaran yang tercantum dalam Renja harus konsisten dengan sasaran-sasaran yang tercantum dalam Renstra.
- 4. Implementasi Renstra:
Renja merupakan implementasi dari Renstra yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan.

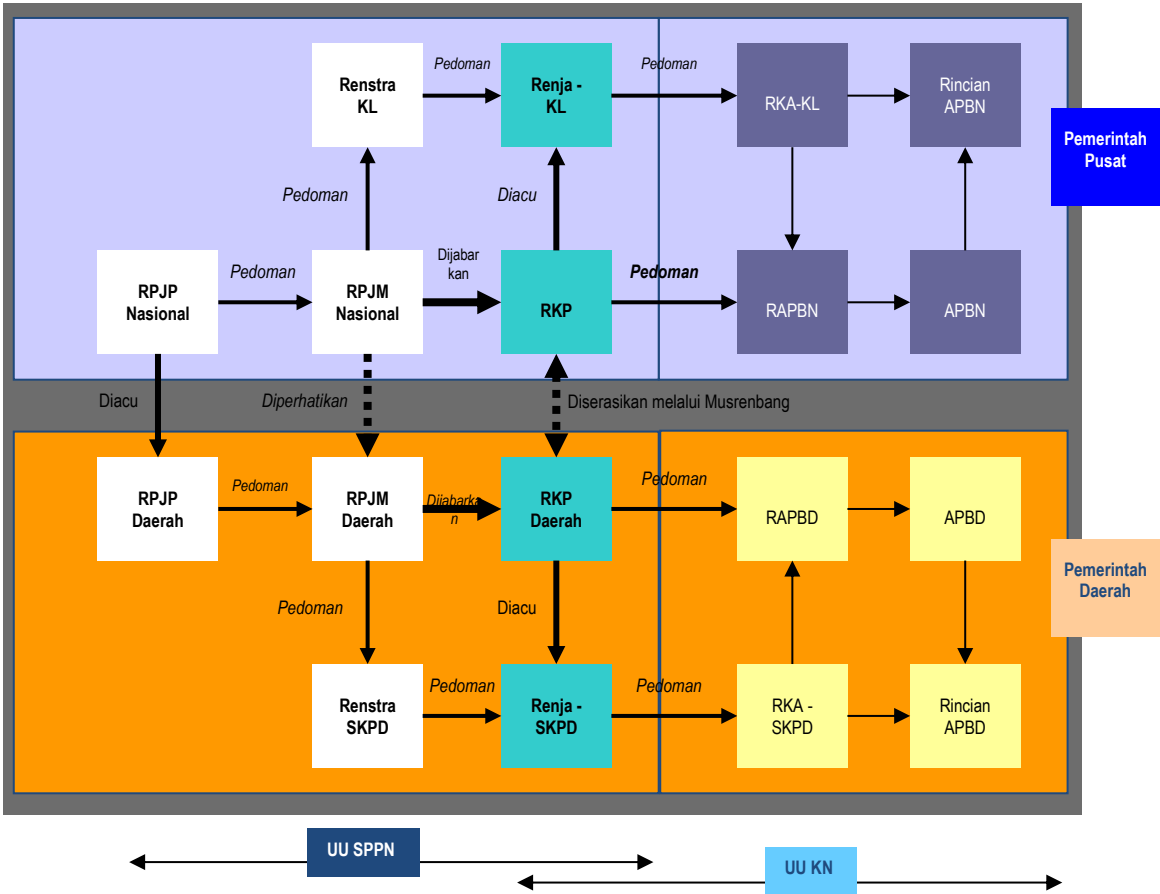
Dalam menyusun Renja, perlu mempertimbangkan Renstra untuk memastikan keterkaitan dan keselarasan antara keduanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Beberapa manfaat keterkaitan Renja dengan Renstra adalah:

- 1. Peningkatan Efektivitas:
Keterkaitan Renja dengan Renstra dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 2. Peningkatan Efisiensi:
Keterkaitan Renja dengan Renstra dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3. Pencapaian Sasaran:
Keterkaitan Renja dengan Renstra dapat membantu mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo yang berpedoman pada RPJMD Kota Blitar dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Renja. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukorejo dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
 29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
 30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5); dan
 31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo dimaksudkan untuk

meningkatkan kinerja penyelenggaraan di Kecamatan Sukorejo untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama lima tahun yang berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo ini adalah :

- a. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Kecamatan Sukorejo selama 5 (lima) tahun terakhir pada periode pembangunan yang lalu.
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Kecamatan Sukorejo selama 5 (lima) tahun mendatang.
- c. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.
- d. Menetapkan rencana program dan kegiatan Kecamatan Sukorejo yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang.
- e. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Sukorejo selama 5 (lima) tahun mendatang.
- f. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
- g. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.1.1 Sukorejo
- 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sukorejo
- 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Sukorejo
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sukorejo
- 2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Sukorejo
- 2.2.2 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukorejo
- 2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis
- 2.2.5 Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sukorejo
3.2	Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Walikota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten / kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya.

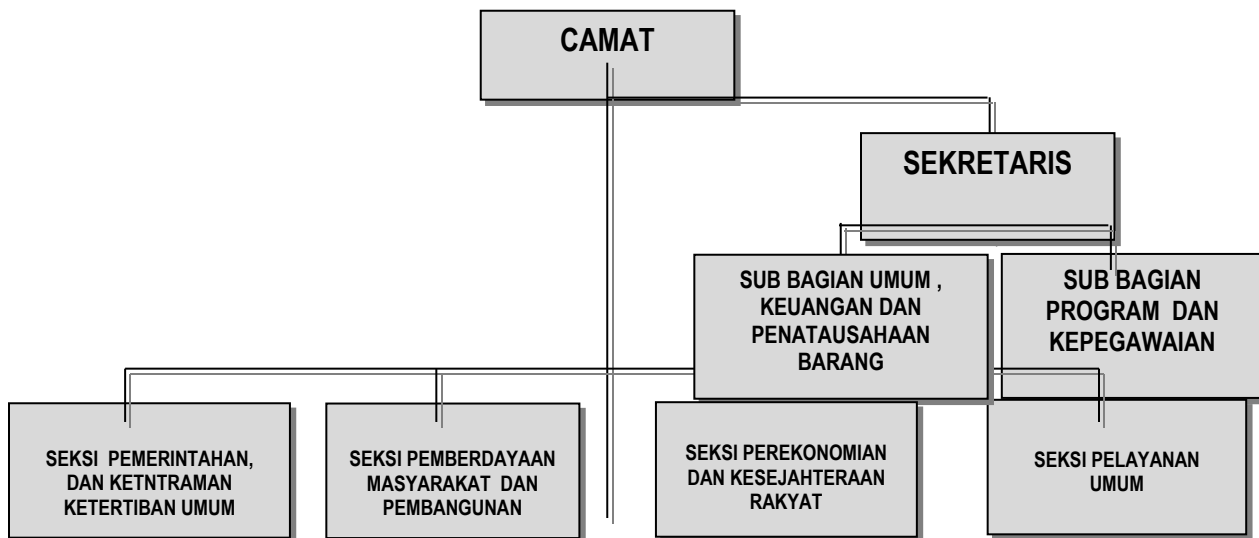
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sukorejo

Kecamatan Sukorejo merupakan salah satu unit kerja perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis sebagai penyelenggara pelayanan publik di tingkat Kecamatan. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota/Kabupaten, Kecamatan Sukorejo menjalankan peran penting dalam memberikan layanan administrasi, koordinasi pemerintahan, pembinaan masyarakat, serta fasilitasi pembangunan di wilayahnya. Pelayanan di Kecamatan Sukorejo berorientasi pada prinsip **cepat, tepat, transparan, dan akuntabel**, dengan mengedepankan sikap ramah serta kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukorejo

Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan Kecamatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan sebagai penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, sesuai struktur organisasi berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Sumber: Peraturan Walikota No. 77 Tahun 2016

Kecamatan Sukorejo sebagai perangkat daerah dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota sebagai pelaksana teknis kewilayahan, yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Sukorejo melaksanakan fungsi:

- Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan Kecamatan ;
- Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya ;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan ;
- Penyelenggaraan pelayanan umum teadu Kecamatan;
- Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan sesuai peraturan perundangan;
- Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- Penyelenggaraan dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;
- Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kecamatan;
- Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

- n. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- o. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- q. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- r. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan;
- s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Kecamatan Sukorejo mempunyai kewenangan:

- a. Penetapan dan pengembangan visi, misi, tujuan, dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan di Kecamatan dan kelurahan;
- b. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan Kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan kelurahan;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
- j. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan kelurahan

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing Camat, Sekretaris dan Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian pada Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut:

- 1. Camat mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja

Pemerintahan kota Blitar yang ada di Kecamatan;

- i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar.

2. Sekretaris Kecamatan

Melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dilingkungan Kecamatan meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada seksi, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan;

Sekretaris Kecamatan menjalankan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Camat ;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing – masing seksi secara teadu;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi seksi - seksi di lingkungan Dinas;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- i. pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Kecamatan;
- j. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Kecamatan;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- m. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- n. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- o. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- p. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
- q. pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
- r. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- s. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- t. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing seksi;
- u. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- v. fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- w. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;

- x. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan;
 - y. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja;
 - z. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Program dan Kepegawaian, melaksanakan tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi program dan kepegawaian;
 - c. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi program dan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan masing-masing unit di Kecamatan dan kelurahan;
 - e. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan administrasi pada Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
 - f. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan dan kelurahan;
 - g. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
 - h. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja;
 - i. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - j. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi program dan kepegawaian;
 - l. menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian Kecamatan dan Kelurahan;
 - m. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja di Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang, melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
 - c. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
 - d. melaksanakan dan mengelola surat-menyurat dan tata kearsipan;
 - e. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
 - f. pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas kehumasan;
 - g. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;

- h. melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - i. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - j. melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - k. melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha sewa sarana prasarana di Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 - l. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - m. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
 - n. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - o. melaksanakan pengelolaan urusan gaji pegawai;
 - p. menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan;
 - q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang;
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pemerintahan dan ketenteraman ketertiban umum;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan pada Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Umum;
 - d. melaksanakan inventarisasi tanah aset dan menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi optimalisasi pemanfaatan tanah aset;
 - e. Membantu penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Satpol PP, Polri dan atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - g. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - h. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan administrasi pertanahan/keagrariaan;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan politik dan idiologi Negara;
 - j. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Kelurahan dan penyelesaian perselisihan sengketa yang terjadi di Kelurahan;
 - k. menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi optimalisasi pemanfaatan tanah bekas bengkok;
 - l. membantu dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - m. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan penyelenggaraan kerukunan hidup baik antar umat beragama maupun antara umat beragama dengan Pemerintah;
 - n. menyiapkan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kesra Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - o. menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;

- p. menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinir pelaksanaan pencegahan serta penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi;
 - q. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - r. menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - s. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
 - t. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan laporan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban Kecamatan;
 - u. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi penanganan perlindungan masyarakat akibat pelanggaran HAM dan masalah sosial di Kecamatan;
 - v. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, mempunyai tugas;
- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
 - b. mengumpulkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
 - e. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan
 - f. menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi dan pengawasan penyaluran bantuan pembangunan;
 - g. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan tata ruang wilayah Kecamatan dan penyusunan profil Kecamatan dan/ atau kelurahan;
 - h. melaksanakan fasilitasi dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
 - i. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan Kecamatan;
 - j. melaksanakan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah Kecamatan;
 - k. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan di Kecamatan;
 - l. melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap pembangunan lingkungan hidup di Kecamatan;
 - m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
 - n. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
 - o. melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - p. melakukan pendataan hasil kerja pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
 - q. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

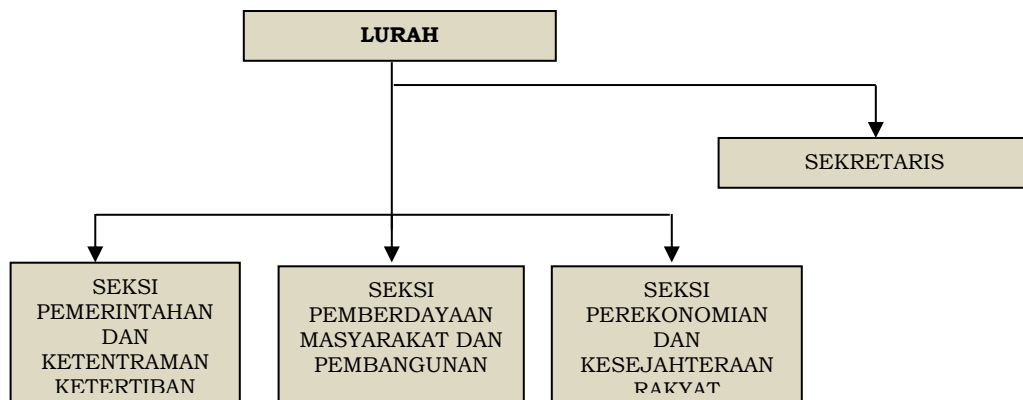
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas;
- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. mengumpulkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan pada Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. melakukan inventarisasi dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian masyarakat kelurahan, usaha industri kecil dan menengah;
 - f. fasilitasi penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular di Kecamatan;
 - g. fasilitasi penyiapan dan data serta memantau pelaksanaan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan;
 - h. fasilitasi pembinaan dan monitoring terhadap usaha-usaha ketahanan pangan dan pertanian;
 - i. fasilitasi pengawasan terhadap penyaluran bantuan dan pengembalian dana bergulir dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan di wilayah Kecamatan;
 - j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembinaan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kecamatan;
 - k. Menyiapkan bahan dan data sebagai dukungan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
 - l. pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
 - m. mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan pengiriman, penyaluran dan pendistribusian bantuan-bantuan sosial;
 - n. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - o. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan publik;
 - b. mengumpulkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pelayanan publik;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan;
 - e. menyiapkan dan mengevaluasi data sebagai bahan pembinaan penyusunan monografi Kecamatan;
 - f. Melaksanakan penyusunan, pengolahan dan pemeliharaan data dalam rangka peningkatan pelayanan kependudukan;
 - g. Menyusun dan melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (standar pelayanan prima) kepada masyarakat;
 - h. Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau melaksanakan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - i. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik di wilayahnya;

- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- k. melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat;
- l. melaksanakan pengelolaan data/ dokumentasi pelayanan publik;
- m. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pelayanan umum;
- n. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

II. KELURAHAN

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Adapun susunan struktur organisasi Kelurahan sebagai berikut:

Gambar 2.2
SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN



Sumber: Peraturan Walikota No. 77 Tahun 2016

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- a. perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan;
- b. penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan administrasi kependudukan di kelurahan;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- e. pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
- f. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan;
- g. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- h. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- i. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- j. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat;

- n. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas, Lurah melaksanakan fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan mempunyai kewenangan:

- a. pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. pelaksanaan tugas di bidang pembangunan yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.
- e. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan eks tanah bengkok serta pemungutan Pajak bumi dan Bangunan; dan
- f. pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kelurahan.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sukorejo

a. Sumber Daya Manusia :

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi terutama pemerintah yang memiliki tugas utama pelayanan. Dalam klasifikasinya, SDM yang ada di setiap institusi pemerintah terdiri dari SDM yang berfungsi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Begitu pula yang ada di Kecamatan, terlebih Kecamatan sesuai dengan PP 17 Tahun 2018 memiliki posisi yang sangat strategis, dimana Kecamatan memiliki kedudukan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati / Walikota dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum.

Memperhatikan tugas pokok dan posisi Kecamatan yang sangat strategis, maka diperlukan SDM yang mumpuni dari segi kualitas dan kuantitas guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menggerakkan organisasi Kecamatan dan menjalankan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan tersebut, maka Kecamatan Sukorejo didukung oleh 78 (tujuh puluh delapan) personil yang tersebar di Kecamatan dan 7 Kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Sukorejo dengan penggolongan pegawai sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Sukorejo berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Sarjana (S2)	2	2	4
2	Sarjana (S1)	12	23	35
3	Diploma IV	0	0	0
4	Diploma III	1	9	10
5	Diploma II	0	1	1
6	SMA	26	2	28
7	SMP	0	0	0
8	SD	0	0	0
Jumlah Keseluruhan		41	37	78

Sumber: Kecamatan Sukorejo, April 2025

Kualifikasi pendidikan terbanyak adalah Strata 1 mencapai 44,87% sedangkan lulusan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 35,90% kemudian Diploma sebanyak 14,10% dan sisanya lulusan Magister sebanyak 5,13%. Bila kita perhatikan data diatas kemudian kita sandingkan dengan tugas pokok fungsi Kecamatan sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2018, maka komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan yang ada di Kecamatan sudah seperti piramid yang artinya jumlah konseptor lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pelaksana dilapangan. Kondisi di Tahun 2025 yang ada di Kecamatan Sukorejo berdasarkan kualifikasi pendidikan diatas, menunjukkan bahwa komposisi pegawai seperti piramid dimana jumlah pegawai konseptor lebih sedikit dibandingkan dengan pelaksananya. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, meskipun jumlah pegawai di Kecamatan Sukorejo beserta kelurahannya lebih banyak yang memiliki pendidikan SMA atau S1, tidak ada kendala bahkan sering konsep-konsep atau aplikasi kebijakan dilaksanakan oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan tersebut.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Sukorejo berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Golongan IV			
	Pembina Tk.I (IV/b)	1	0	1
	Pembina (IV/a)	0	1	1
2	Golongan III			
	Penata Tk. I (III/d)	6	5	11
	Penata (III/c)	5	7	12
	Penata Muda Tk. I (III/b)	2	16	18
	Penata Muda (III/a)	6	8	14
	Penata Muda (IX)	0	6	6
3	Golongan II			
	Pengatur Tk. I (II/d)	5	2	7
	Pengatur (II/c)	6	0	6
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2	0	2
	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
	Pengatur Muda (V)	0	0	0

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
4	Golongan I			
	Juru Tingkat I (I/d)	0	0	0
	Juru (I/c)	0	0	0
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	0	0	0
	Juru Muda (I/a)	0	0	0
	Jumlah Keseluruhan	33	45	78

Sumber: Kecamatan Sukorejo, April 2025

Komposisi pegawai berdasarkan golongan ruang memiliki hubungan erat dengan komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian bahwa golongan ruang untuk pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA minimal golongan II/a sedangkan untuk pendidikan S1 minimal golongan ruang III/a.

Bila kita perhatikan tabel diatas, maka komposisi pegawai Kecamatan dan kelurahan se-Kecamatan Sukorejo berdasarkan golongan ruang didominasi oleh golongan III, hal ini berbanding lurus dengan jumlah pegawai berdasarkan pendidikan yang didominasi dengan pegawai berkualifikasi SMA maupun SMP. Komposisi pegawai berdasarkan golongan ini mempengaruhi terhadap jumlah pegawai berdasarkan jabatannya baik itu administrator, jabatan pengawas maupun pelaksana.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terdapat rumpun jabatan administrasi yang didalamnya ada jabatan administrator yang setara dengan eselon III, jabatan pengawas setara dengan eselon IV dan jabatan pelaksana setara dengan jabatan fungsional umum atau lazim disebut dengan staf. Dari tabel diatas posisi jabatan pengawas didukung oleh pegawai dengan golongan ruang III/b, sehingga dari total pegawai terdapat 53,85% yang menduduki jabatan administrator dan pengawas sedangkan sisanya atau sekitar 46,15% menduduki jabatan pelaksana.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Sukorejo berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Camat	1	0	1
2	Sekretaris Kecamatan	0	1	1
3	Lurah	6	1	7
4	Sekretaris Kelurahan	6	1	7
5	Kepala Seksi Pelayanan Umum	0	1	1
6	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1	7	8
7	Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantibum	8	0	8
8	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	0	8	8
9	Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian	0	1	1
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	1	1
11	Penelaah Teknis Kebijakan	2	4	6

No	Jabatan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
12	Penata Kelola Sistem dan Teknologi	0	0	0
13	Pamong Pemerintahan	0	0	0
14	Pengolah Data dan Informasi	2	6	8
15	Pengadministrasi Perkantoran	13	2	15
16	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	0	5	5
17	Arsiparis Pelaksana/Terampil	1	0	1
18	Penata Layanan Operasional	0	0	0
19	Operator Layanan Operasional	0	0	0
Jumlah Keseluruhan		40	38	78

Sumber: Kecamatan Sukorejo, April 2025

Jumlah pejabat struktural yang ada di Kecamatan Sukorejo berdasarkan tabel diatas sejumlah 42 orang. Apabila kita perhatikan dengan formasi kebutuhan pejabat struktural yang ada di Kecamatan dan kelurahan, maka hal tersebut sudah tercukupi untuk Kecamatan dan kelurahan.

Selain pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut diatas, maka untuk melaksanakan tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan dan kelurahan, juga dibantu oleh Tenaga Pendukung Lainnya dan tenaga P3N atau modin. Tenaga Pendukung Lainnya sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang, yaitu terdiri dari Tenaga Pendukung Pengelola Kepegawaian sejumlah 1 (satu) orang, Tenaga Pendukung Pengadministrasi Umum sejumlah 10 (sepuluh) orang, Tenaga Kebersihan sejumlah 9 (sembilan) orang, Tenaga Keamanan sejumlah 12 (dua belas) orang dan Tenaga Pengemudi sejumlah 1 (satu) orang. Adapun penempatan tenaga pendukung lainnya menyebar di kelurahan se-Kecamatan Sukorejo maupun di Kecamatan Sukorejo. Tenaga Pendukung Lainnya yang ditempatkan di Kecamatan Sukorejo sejumlah 12 (dua belas) orang dan di kelurahan 21 (dua puluh satu) orang dengan persebaran penempatan Tenaga Pendukung Pengadministrasi Umum, Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan pada masing-masing kelurahan sebanyak 1 (satu) orang sedangkan yang lainnya ditempatkan di Kecamatan.

Selain dibantu dengan tenaga pendukung lainnya, dalam melaksanakan tugas Kecamatan dan kelurahan juga dibantu oleh 11 (sebelas) petugas pencatat nikah maupun modin bagi yang beragama Islam, Kristen, Hindu maupun Budha. Adapun penempatannya yaitu untuk P3N sejumlah 2 (dua) orang bertugas sehari-hari di Kecamatan Sukorejo sedangkan 9 (Sembilan) orang modin sehari-hari bertugas di kelurahan.

b. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pencapaian yang lebih berkualitas, Kecamatan Sukorejo didukung sarana dan prasarana relatif memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Sukorejo dan Kelurahan di wilayah Kecamatan Sukorejo sampai dengan Bulan Agustus tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah berdasarkan Kondisi

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
	KECAMATAN SUKOREJO		
1	Gedung Kantor	1	Baik
2	Kendaraan Dinas (R2 dan R3)	13	Baik
3	Laptop	23	Baik
4	PC Komputer	10	Baik
5	monitor	1	Baik
6	Scanner	1	Baik
7	Printer	19	Baik
8	LCD Proyektor	3	Baik
9	Televisi	6	Baik
10	Meja	28	Baik
11	Kursi Kerja	29	Baik
12	Kursi Lipat	130	Baik
13	AC	9	Baik
14	Kipas Angin	15	Baik
15	Almari	17	Baik
16	Filling Kabinet	15	Baik
17	Lemari Besi	2	Baik
18	Camera	6	Baik
19	Handy Cam	3	Baik
20	Handy Talky	20	Baik
21	Handphone	8	Baik
22	CCTV (paket)	1	Baik
23	Camera CCTV	2	Baik
24	Sofa	5	Baik
25	Podium	1	Baik
26	KULKAS	2	Baik
27	Genset	3	Baik
28	fingerint	1	Baik
29	Acses point	1	Baik
30	Sound sistem	5	Baik
31	Gerobak sampah	1	Baik
32	Mesin Pemotong Rumput	2	Baik
33	UPS	5	Baik
34	Hardisk	2	Baik
	KELURAHAN PAKUNDEN		
1	Gedung Kantor	1	Baik
2	Sepeda Motor	5	Baik
3	Printer	8	Baik
4	Laptop	6	Baik
5	Kursi Biasa/Rapat Chitose	30	Baik
6	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	Baik
7	AC Split	3	Baik
8	Tiang Bendera	20	Baik
9	Wastafel	11	Baik
10	Tenda	1	Baik
11	Brankas / Brangkas	1	Baik
12	Televisi	1	Baik
13	Filing Cabinet Besi	4	Baik
14	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik
15	Brankas / Brangkas	1	Baik
16	Mesin Potong Rumput	2	Baik
17	Mesin Penghancur Kertas	1	Baik
18	Kulkas/Lemari Es	1	Baik
19	Camera	1	Baik
20	Papan Visual	1	Baik

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
21	Kipas Angin	1	Baik
22	Papan Pengumuman	2	Baik
23	Sepeda Motor Roda Tiga/Viar	1	Baik
24	Kursi Putar	4	Baik
25	CCTV	4	Baik
26	Kursi Pelayanan	5	Baik
27	Sprayer	22	Baik
28	Sofa	1	Baik
29	Microphone/wirelees	2	Baik
30	Genset	1	Baik
31	Fingerint/Mesin Absensi	1	Baik
32	Timbangan Gantung	4	Baik
33	Tempat Sampah	1	Baik
34	Gerobak Sampah	3	Baik
35	Lemari/Rak buku-buku	1	Baik
	KELURAHAN BLITAR		
1	Gedung Kantor	1	Baik
2	Kendaraan Dinas (R2 dan R3)	6	Baik
3	AC	2	Baik
4	Wastafell	10	Baik
5	Lemari	10	Baik
6	Microphone	1	Baik
7	Mesin potong rumput	2	Baik
8	Loudspeaker	1	Baik
9	Handy Talky	2	Baik
10	Kursi	9	Baik
11	Kipas Angin	1	Baik
12	Printer	6	Baik
13	UPS	1	Baik
14	Meja	13	Baik
15	Televisi	2	Baik
16	sound system	6	Baik
17	Kulkas	1	Baik
18	Komputer	4	Baik
19	Laptop	3	Baik
20	Fingerint	1	Baik
21	LCD Proyektor	1	Baik
22	Running text	1	Baik
23	Papan evakuasi	5	Baik
24	Tandon air	1	Baik
25	Timbangan Gantung	3	Baik
26	Gerobak sampah	3	Baik
27	Kulkas	1	Baik
28	Speaker aktif	2	Baik
29	Radio access point	1	Baik
	KELURAHAN TLUMPU		
1.	Gedung Kantor	1	Baik
2.	Sepeda Motor Operasional	4	Baik
3.	Laptop	5	Baik
4.	Komputer-monitor - CPU	4	Baik
5.	Printer	7	Baik
6.	Kursi Kerja Pejabat Eselen IV	5	Baik
7.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6	Baik
8.	Filling Cabinet	4	Baik
9.	Sound System	1	Baik
10.	Handphone	3	Baik
11.	Kamera Elektronik	1	Baik
12.	Lampu Hias Gantung	1	Baik
13.	AC	2	Baik

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
14.	Kamera CCTV	7	Baik
15.	Mesin Absensi	1	Baik
16.	Generating Set	1	Baik
17.	Lemari Kaca	2	Baik
18	Mickropon	3	Baik
19	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
20	Kipas Angin	3	Baik
21	Tenda	1	Baik
22	Lemari besi	1	Baik
23	Rak Besi	2	Baik
24	Papan nama instansi	1	Baik
25	Handy Talky (HT)	3	Baik
26	Lemari Es	1	Baik
27	Brankas	1	Baik
28	Meja pelayanan	1	Baik
29	Lemari kayu	2	Baik
30	Bufet kayu	1	Baik
31	TV	1	Baik
32	Viar roda 3	1	Baik
33	Kursi tamu	3	Baik
	KELURAHAN TURI		
1	Gedung Kantor	1	Baik
2	Kendaraan Dinas (R2 dan R3)	6	Baik
3	AC	1	Baik
4	Wastafell	7	Baik
5	Almari	13	Baik
6	Brankas	2	Baik
7	Backdrop	1	Baik
8	CCTV	6	Baik
9	Filling Kabinet	2	Baik
10	Handy Talky	2	Baik
11	Kursi	100	Baik
12	Kipas Angin	2	Baik
13	Printer	6	Baik
14	Mesin penyemprot	5	Baik
15	Meja	9	Baik
16	Neon book	11	Baik
17	Scanner	2	Baik
18	KULKAS	1	Baik
19	Genset	1	Baik
20	Komputer	1	Baik
21	Laptop	6	Baik
22	fingerint	1	Baik
23	LCD Proyektor	1	Baik
	KELURAHAN KARANGSARI		
1	Gedung Kantor	1	Baik
2	Kendaraan Dinas	6	Baik
3	Laptop	6	Baik
4	Printer	5	Baik
5	AC	4	Baik
6	Westafel portable	14	Baik
7	Kipas Angin	3	Baik
8	Tenda	1	Baik
9	Sprayer	7	Baik
10	Mixer 2 mic	2	Baik
11	Sound Sistem	3	Baik
12	Kursi Chitose	25	Baik
13	Pencacah Kertas	1	Baik
14	Rak	4	Baik
15	Toa	6	Baik

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
16	Running text	1	Baik
17	Meja	5	Baik
18	Lemari	10	Baik
19	Kursi Pelayanan	6	Baik
20	Komputer	2	Baik
21	Tablet	7	Baik
22	CCTV	6	Baik
	KELURAHAN SUKOREJO		
1	Gedung Kantor	1	Baik
2	Laptop / Notebook	6	Baik
3	Meja Rapat	4	Baik
4	Meja Kursi Rapat	1	Baik
5	Personal Computer	2	Baik
6	Kursi Tamu	1	Baik
7	Almari Arsip	8	Baik
8	Brangkas	1	Baik
9	Sepeda Motor Roda 2	5	Baik
10	Sepeda Motor Roda 3	1	Baik
11	Printer	7	Baik
12	Finger Print	1	Baik
13	Handy Talky (HT)	2	Baik
14	LCD Proyektor	1	Baik
15	Televisi	3	Baik
16	Salon Pasif	2	Baik
17	Kursi Kerja	10	Baik
18	Kursi Tunggu Pelayanan	2	Baik
19	Horn Speaker Merk TOA 25 Watt	1	Baik
20	AC / Air conditioner	3	Baik
21	Neon Box	4	Baik
22	CCTV	6	Baik
23	Timbangan Gantung	2	Baik
24	Gerobak Sampah	6	Baik
25	Tablet / Smarthphone	5	Baik
26	Jaringan LAN dan WiFi Outdoor	1	Baik
	KELURAHAN TANJUNGSARI		
1	AC (Air Conditioning)	1	Baik
2	Brankas / Brangkas	1	Baik
3	Camera Electronic	1	Baik
4	Gerobak Dorong (Gerobak Sampah/ Gerobak Pasir dll)	6	Baik
5	Handy Talky (HT)	1	Baik
6	Kamera CCTV	1	Baik
7	Viar roda 3	1	Baik
8	Kipas Angin	2	Baik
9	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
10	Laptop	3	Baik
11	Layar Film/Projector	1	Baik
12	LCD Proyektor	2	Baik
13	Lemari Es	1	Baik
14	Lemari Kaca	2	Baik
15	Lemari Kayu	2	Baik
16	Local Area Network (LAN)	1	Baik
17	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	12	Baik
18	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
19	Meja Rapat	2	Baik
20	Meja Resepsion	2	Baik
21	Mesin Ketik Manual	1	Baik
22	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
23	P.C Unit	1	Baik

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
24	Personal Komputer Lain-lain	3	Baik
25	Printer	2	Baik
26	Scanner	1	Baik
27	Sepeda Motor	3	Baik
28	Sound System	1	Baik
29	Sofa	1	Baik
30	Televisi	1	Baik
31	Tempat Koran / Majalah	1	Baik
32	Tenda	1	Baik
33	Timbangan Gantung	3	Baik
34	UPS	1	Baik
35	Wastafel	10	Baik

Sumber: Kecamatan Sukorejo, 2025

Pelaksanaan tugas fungsi Kecamatan Sukorejo didukung dengan Sarana Prasarana Kantor yang cukup memadai di Kecamatan maupun di 7 (tujuh) kelurahan. Jumlah aset sampai dengan Agustus 2025 adalah senilai 202.980.741.379,63 yang terbagi kedalam 5 (lima) jenis bidang yaitu Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Sukorejo

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian Kinerja Kecamatan Sukorejo Tahun 2022-2025 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Tahun 2022-2025 melalui perumusan kebijakan yang tertuang dalam Program dan Kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukorejo dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan
Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Kecamatan Sukorejo
Tahun 2022-2025

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/SPM/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	*2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra													
1	Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	IKU (Indikator Kinerja Utama)	Baik (89)	Baik (89)	Baik (89,10)	Baik (89,15)	Baik (89,11)	Baik (90,26)	Baik (90,61)	Baik (95,36)	100,12%	101,42%	101,69%	106,97%
2	Sasaran I : Persentase Pelayanan yang Sesuai Dengan Standart Pelayanan		97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	103%	103%	100%	100%
3	Sasaran II : Persentase Kelurahan Berdaya		75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	133%	133%	100%	100%
4	Sasaran III : Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sukorejo		A (84,76)	A (84,76)	A (84,80)	A (84,85)	A (85,00)	A (85,16)	A (85,37)	A (85,45)	100,28%	100,47%	100,67%	100,71%
II	Indikator Program Prioritas													
1	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu		97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	103%	103%	100%	100%
2	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase RT berdaya		75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	133%	133%	100%	100%
3	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukorejo
*Realisasi sampai dengan Bulan Agustus 2025



Sumber: LKjIP Kecamatan Sukorejo

*Realisasi sampai dengan Bulan Agustus 2025

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukorejo adalah merupakan tujuan Kecamatan Sukorejo, yaitu “meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan indikatornya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan. Aktivitas pelayanan publik memang selayaknya memperhatikan kepuasan masyarakat, karena hal itu menunjukkan kualitas pelayanan yang diterima dari penyelenggara pelayanan. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat maka menunjukkan semakin tinggi pula mutu pelayanan yang dilaksanakan.

Tolak ukur keberhasilan atau kegagalan indikator tujuan Kecamatan Sukorejo, yakni dengan melaksanakan penghitungan persentase kepuasan masyarakat melalui Sukma-e Jatim. Setiap selesai menerima layanan, maka diwajibkan mengisi survey kepuasan masyarakat pada Sukma-e Jatim sehingga dapat diketahui jumlah pengguna layanan yang puas dan tidak puas terhadap layanan yang diberikan perangkat Kecamatan. Dari data tabel diatas diperoleh nilai rasio capaian lebih dari 100%, artinya seluruh realisasi pencapaian kinerja melebihi target.

Dalam melaksanakan Pengukuran Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Sukorejo mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017, yang menitik beratkan pada 9 (sembilan) unsur yang "relevan", "valid" dan "reliabel", sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran survey kepuasan masyarakat yang meliputi persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan sarana prasarana. Dalam pengukuran nilai IKM bertarget baik mulai tahun 2022-2025, maka proyeksi nilai baik dapat dicapai dalam kurun waktu tersebut .

Pada sasaran strategis pertama “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikatornya, yaitu Persentase Pelayanan yang Sesuai Dengan Standart Pelayanan. Sasaran tersebut secara konsisten mencapai realisasi 100% selama empat

tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan konsistensi dalam memberikan layanan. Pada tahun 2022 dan 2023 realisasinya mencapai 100% dengan tingkat capaiannya mencapai 103% dikarenakan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 97%.

Pada sasaran kedua kedua “Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah” dengan Indikatornya, yaitu Persentase Kelurahan Berdaya adalah hasil dari penghitungan jumlah hasil koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan & ketertiban, kesejahteraan sosial & pembangunan di wilayah yang ditindak lanjuti dalam satu tahun dibagi jumlah semua koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan & ketertiban, kesejahteraan sosial serta pembangunan di wilayah dalam satu tahun yang selanjutnya dikalikan 100%. Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi capaian 100%, terutama pada tahun 2022 dan 2023 dimana tingkat capaiannya mencapai 133% sehingga melampaui target 75%. Hal ini mengindikasikan bahwa koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan & ketertiban, kesejahteraan sosial serta pembangunan di wilayah berjalan sukses melampaui yang direncanakan dengan realisasi yang konsisten 100% di semua tahun membuktikan keberhasilan tersebut .

Kunci keberhasilan tercapainya target pada indikator kinerja sasaran strategis yang kedua ini, yaitu:

1. Aktif dan responsif terhadap permasalahan yang muncul, sehingga dapat segera melakukan koordinasi dengan perangkat Kecamatan, pemeliharaan terhadap *Software* maupun *hardware* dalam hal pelayanan terhadap masyarakat dapat dipenuhi semua. Seperti halnya SOP, pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, sarana prasarana pendukung layanan serta mampu berimprovisasi dengan perkembangan jaman. Terkait dengan improvisasi dengan perkembangan jaman yaitu dalam pelayanan di Tahun 2022, Kecamatan Sukorejo memanfaatkan media sosial seperti *facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp* dalam menyampaikan seluruh jenis layanan yang ada di Kecamatan Sukorejo.
2. Hubungan serta koordinasi dengan lintas sektor seperti perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Blitar maupun instansi vertikal yang ada kaitan dengan tugas pokok fungsi Kecamatan (TNI dan POLRI) dapat terjalin dengan baik. Hal ini terwujud dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan untuk mempererat hubungan antara masing-masing instansi ini seperti kegiatan forum pimpinan Kecamatan, FKUB dan FKDM yang mana forum-forum ini diselenggarakan untuk membahas setiap permasalahan-permasalahan yang muncul maupun antisipasi kejadian yang akan ditimbulkan.
3. Menjalin hubungan baik dengan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan bidang perekonomian dan kesejahteraan Rakyat melalui Program Bansos, Rastrada, serta bantuan Kematian melalui pemberian Natura dan lain sebagainya. Sedangkan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan dengan melalui pelaksanaan RT Keren dengan memberdayakan masyarakat sekitar.

Pada sasaran strategis ketiga “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” dengan indikatornya, yaitu Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sukorejo membuktikan Akuntabilitas internal kecamatan Sukorejo menunjukkan performa dan

kerjasama yang baik antar perangkat Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kecamatan Sukorejo. Nilai SAKIP secara konsisten meraih predikat "A" dan realisasinya selalu di atas target yang ditetapkan. Capaian yang terus meningkat setiap tahun dari 100,28% pada 2022 menjadi 100,71% pada 2025 mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan.

Pada Indikator program prioritas menunjukkan bahwa eksekusi program-program unggulan berjalan dengan efektivitas dan keandalan yang sangat tinggi. Semua target program prioritas berhasil tercapai.

Pada sasaran program : “ Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik” dengan indikatornya, yaitu Pelayanan Kecamatan Tepat Waktu dan “Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum” dengan indikatornya, yaitu Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti secara konsisten mencapai realisasi 100%. Hal tersebut menandakan bahwa proses operasional inti kecamatan, baik dalam pelayanan langsung maupun fungsi koordinasi, berjalan tanpa hambatan dan sangat andal.

Keberhasilan sasaran Program “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan” dengan Indikator:

1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti tercapai 100% di setiap tahun.
2. Persentase RT berdaya yang juga menunjukkan capaian sebesar 133% pada tahun 2022 dan 2023.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Sukorejo sebagai garda terdepan pemerintahan di tingkat kewilayahan, melayani spektrum sasaran yang luas dan beragam. Pelayanan tidak hanya bersifat reaktif terhadap kebutuhan administratif masyarakat umum, tetapi juga proaktif dalam membina dan memberdayakan berbagai elemen komunitas.

Secara mendasar, kelompok sasaran pelayanan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan utama:

1. Masyarakat Umum (Publik): sebagai sasaran primer, masyarakat umum adalah penerima layanan langsung yang bersifat administratif dan esensial. Kualitas pelayanan kepada kelompok ini menjadi tolok ukur utama keberhasilan Kecamatan, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
2. Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Spesifik: Kecamatan berperan sebagai fasilitator dan pembina bagi berbagai institusi lokal. Pelayanan yang diberikan kepada kelompok ini bertujuan untuk mendorong partisipasi, kemandirian, dan sinergi dalam pembangunan wilayah, sejalan dengan program pemberdayaan dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
3. Aparatur Internal (Pemerintahan Kelurahan): sebagai unit kerja di bawah Kecamatan Sukorejo dengan tujuh kelurahan di wilayah Kecamatan Sukorejo menjadi sasaran pembinaan, pengawasan, dan koordinasi. Pelayanan ini memastikan adanya standarisasi, keselarasan program, dan efektivitas tata kelola pemerintahan hingga tingkat paling lokal.

Pendekatan pelayanan yang bertingkat memungkinkan Kecamatan Sukorejo untuk menjalankan fungsi gandanya, yaitu sebagai penyedia layanan langsung yang efisien dan sebagai koordinator pembangunan kewilayahan yang efektif.

Identifikasi Kelompok Sasaran dan Bentuk Layanan yang diberikan Kecamatan Sukorejo kepada kelompok sasaran pelayanan tersebut, yaitu sebagaimana berikut :

a. Masyarakat Umum (publik) :

Kelompok sasaran yang mencakup seluruh warga yang berdomisili atau beraktivitas di wilayah Kecamatan Sukorejo dan membutuhkan layanan administrasi dasar serta fasilitasi dari pemerintah.

- Bentuk layanan yang diberikan, yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan, yaitu berupa fasilitasi dan legalisasi dokumen kependudukan yang menjadi kewenangan Kecamatan, seperti perekaman KTP elektronik.
2. Pelayanan Umum Terpadu, yaitu berupa berbagai layanan perizinan dan non-perizinan yang dilimpahkan oleh Walikota.
3. Fasilitasi Administrasi Pertanahan, yaitu berupa pelayanan terkait pengurusan surat-surat pertanahan sesuai kewenangan Camat sebagai PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara).
4. Penanganan Pengaduan, yaitu dengan menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan publik dan isu kewilayahan.
5. Fasilitasi Pemungutan Pajak, yaitu berupa koordinasi dan fasilitasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
6. Informasi Pembangunan, yaitu dengan menyediakan data dan informasi mengenai hasil-hasil pembangunan di wilayah kecamatan.

b. Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Spesifik

Kelompok sasaran yang terdiri dari organisasi formal dan informal yang menjadi motor penggerak kegiatan sosial, ekonomi, dan pembangunan di tingkat kelurahan.

- Bentuk layanan yang diberikan, yaitu :

1. Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan, yaitu dengan melakukan pembinaan dan fasilitasi bagi lembaga kemasyarakatan (RT, RW, LPMK, PKK, Karang Taruna), organisasi sosial, dan kelompok masyarakat melalui Karya Mas.
2. Fasilitasi Musrenbang, yaitu dengan mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dan lembaga dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan.
3. Pembinaan Ekonomi Lokal, yaitu dengan pembinaan terhadap lembaga perekonomian masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mengadakan pelatihan melalui Karya Mas.
4. Pembinaan Kerukunan Sosial, yaitu berupa fasilitasi dan pembinaan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban umum melalui FKDM (Forum Komunikasi Dini Masyarakat), FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama), maupun FKP (Forum Komunikasi Publik).
5. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga, yaitu dengan mengkoordinasikan program pembinaan pendidikan, pemuda, dan olahraga di wilayah Kecamatan Sukorejo.

c. Aparatur Internal (Pemerintahan Kelurahan)

Kelompok sasaran yang mencakup Lurah beserta seluruh jajaran aparatur di tujuh kelurahan yang berada di bawah koordinasi Kecamatan Sukorejo.

- Bentuk layanan yang diberikan, yaitu :
 1. Pembinaan dan Pengawasan, yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan seluruh kegiatan pemerintahan dan pelayanan di tingkat kelurahan.
 2. Koordinasi Program, yaitu dengan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan serta Sub Kegiatan agar selaras dengan kebijakan di tingkat kecamatan dan kota.
 3. Dukungan Administratif, yaitu dengan memberikan dukungan dalam pengelolaan administrasi, keuangan, dan pelaporan kinerja kelurahan.
 4. Peningkatan Kapasitas, yaitu berupa fasilitasi untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi aparatur kelurahan.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam penyelenggaraan pelayanan, Kecamatan Sukorejo tidak bekerja sendiri. Pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan melalui kemitraan lintas perangkat daerah dan lembaga terkait. Dispendukcapil mendukung bidang kependudukan, Dinas Kesehatan menangani aspek kesehatan, Dinas Sosial membantu penyaluran bansos, Diskominfotik memperkuat layanan digital, sementara Forkopimcam memastikan ketertiban wilayah. Kolaborasi ini memastikan pelayanan publik di kecamatan berjalan terpadu, efektif, dan tepat sasaran.

Berikut adalah identifikasi mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan dan bentuk kemitraan/dukungannya kepada Kecamatan Sukorejo.

MITRA PERANGKAT DAERAH	BIDANG DUKUNGAN	BENTUK KEMITRAAN/DUKUNGAN
Dinas Kependudukan & Catatan Sipil (Dispendukcapil)	Administrasi kependudukan	- Koordinasi penerbitan KTP, KK, akta kelahiran/kematian - Pelayanan jemput bola (perekaman KTP, kartu identitas anak)
Dinas Kesehatan & Puskesmas	Kesehatan masyarakat	- Pelayanan Posyandu, pengendalian stunting (Libas), Mini lokakarya Kesehatan - FKKS dan kelurahan sehat - Fasilitasi sosialisasi pencegahan penyakit
Dinas Sosial	Kesejahteraan sosial	- Penyaluran bantuan sosial (PKH, BPNT, Rastrada) - Fasilitasi rehabilitasi sosial untuk lansia, disabilitas, anak terlantar
Diskominfotik Kota Blitar	Teknologi & informasi publik	- Fasilitasi aplikasi pelayanan digital (AGEMAN MAS RAHMAT) - Dukungan jaringan internet di kecamatan - Publikasi layanan dan informasi kecamatan melalui website

MITRA PERANGKAT DAERAH	BIDANG DUKUNGAN	BENTUK KEMITRAAN/DUKUNGAN
Dinas Perdagangan dan Perindustrian & Dinas Koprasi dan Usaha Mikro	Pemberdayaan ekonomi & UMKM	- Pembinaan usaha mikro - Promosi produk unggulan melalui bazar UMKM Sukorejo Fest
Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan & kebersihan	- Program bank sampah, penghijauan, dan lomba kelurahan berseri - Kebersihan melalui Gertak Berlian (Gerakan Serentak Bersih Lingkungan)
Dinas Pariwisata & Kebudayaan	Budaya & pariwisata lokal	- Pembinaan terhadap kampung tematik - Pembinaan sanggar seni dan komunitas budaya
Inspektorat Daerah	Akuntabilitas & pengawasan	- Pendampingan pembangunan Zona Integritas (WBK & WBBM) - Edukasi antikorupsi & tata kelola pemerintahan bersih
Kecamatan Sukorejo, BPBD dan Satpol PP	Ketertiban & kesiagaan	- Siaga bencana alam dan kebakaran - Ketertiban umum dan kerawanan sosial
Polsek & Koramil (Forkopimcam)	Keamanan & ketertiban	- Dukungan pengamanan acara kecamatan - Penertiban ketertiban umum & koordinasi Trantibum - Sinergi penanganan konflik sosial

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Sukorejo sebagai perangkat daerah terdepan dalam pelayanan publik mendapatkan dukungan dari BUMD untuk memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat. PDAM selaku BUMD memastikan akses air bersih serta mengadakan program *sambungan baru* untuk rumah tangga berpenghasilan rendah (subsidi). Bank Kota Blitar memperkuat sektor permodalan dan layanan keuangan ikut berkontribusi pada kegiatan perekonomian lokal serta mendukung digitalisasi pembayaran PBB/P2. Dukungan BUMD ini memperlihatkan sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan perusahaan daerah dalam membangun pelayanan publik yang lebih merata, responsif, dan berkeadilan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sukorejo

2.2.1. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Sukorejo

Kecamatan Sukorejo memiliki sejumlah potensi daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan Sukorejo dan dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

- Potensi Agrowisata dan Pertanian Perkotaan: Kecamatan Sukorejo memiliki keunggulan sebagai sentra Belimbing Merah Karang Sari yang telah tersertifikasi dan menjadi tujuan wisata petik buah. Potensi ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperkuat ekonomi lokal dan ketahanan pangan.
- Tingginya Kepadatan Penduduk sebagai Pasar Potensial: Sebagai kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Blitar, wilayah ini merupakan pasar yang besar dan potensial untuk pengembangan sektor perdagangan, jasa, dan UMKM.

- c. Luas cakupan wilayah yg relatif kecil apabila dibandingkan Kabupaten memudahkan penyelenggaraan Trantibum.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana untuk akses internet dalam mendukung pelayanan publik.

2.2.2. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukorejo

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diidentifikasi berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Sukorejo selama periode 2022-2025. Data menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja utama dan sasaran strategis secara konsisten tidak hanya tercapai, tetapi bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selalu di atas 100% dari target, bahkan mencapai 106,97% pada tahun 2025. Demikian pula, indikator seperti "Persentase Pelayanan yang Sesuai Standar" dan "Persentase Kelurahan Berdaya" menunjukkan capaian realisasi yang sempurna (100%) hingga sangat memuaskan (133%).

Meskipun kinerja sangat positif, analisis mendalam mengidentifikasi bahwa permasalahan pelayanan tidak lagi terletak pada kegagalan mencapai target, melainkan pada tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan standar kinerja yang sudah sangat tinggi. Tingginya capaian justru menciptakan ekspektasi baru dari masyarakat yang lebih tinggi di masa mendatang.

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan analisis kinerja tersebut, maka permasalahan pelayanan yang dihadapi Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik belum optimal, sehingga beberapa proses masih manual.

Permasalahan belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik adalah isu krusial yang menghambat efisiensi, transparansi, dan kualitas hidup warga. Akar masalahnya kompleks, mencakup aspek sumber daya, infrastruktur, tata kelola, dan budaya. Solusinya memerlukan komitmen kepemimpinan yang kuat, perencanaan yang matang, investasi yang terarah, serta perubahan pola pikir baik di internal Kecamatan Sukorejo maupun di kalangan masyarakat. Dengan mengatasi masalah ini, Kecamatan Sukorejo dapat mewujudkan birokrasi yang modern, responsif, dan mampu memberikan pelayanan prima bagi seluruh warga.

2. Tingkat Keterlibatan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Kurang Merata.

Keberhasilan RT Keren pada program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang capaiannya mencapai 133% dari target pada tahun 2022 dan 2023 menciptakan tantangan baru, yaitu bagaimana memastikan program ini berkelanjutan dan dapat direplikasi dengan skala yang lebih luas tanpa mengurangi kualitas dan dampaknya. Permasalahan yang timbul adalah pemberdayaan masyarakat kurang merata dikarenakan Pokmas yang ikut dalam Program RT Keren terkesan hanya yang itu-itu saja.

3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.

Fenomena menurunnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban (kamtibmas) serta rendahnya kesadaran lingkungan merupakan dua isu krusial yang saling terkait. Keduanya berakar pada masalah yang sama: melemahnya rasa kepemilikan kolektif dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Di sektor keamanan, rendahnya partisipasi terlihat dari mulai ditinggalkannya kegiatan Siskamling, sikap individualistis yang menganggap keamanan hanya menjadi tanggung jawab aparat, serta ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar. Implikasinya jelas: meningkatnya potensi tindak kriminalitas, munculnya gesekan sosial, dan menurunnya rasa aman secara umum. Rasa saling percaya antarwarga terkikis, digantikan oleh kecurigaan dan ketidakacuhan. Di sisi lingkungan, kurangnya kesadaran termanifestasi dalam perilaku sehari-hari seperti membuang sampah sembarangan, mengabaikan kebersihan saluran air, hingga merusak fasilitas umum. Perilaku ini bukan hanya menciptakan lingkungan yang kumuh dan tidak sehat, tetapi juga menjadi pemicu masalah yang lebih besar seperti banjir, penyebaran penyakit, dan penurunan kualitas hidup. Masyarakat sering kali gagal melihat bahwa lingkungan yang rusak pada akhirnya akan merugikan diri mereka sendiri. Secara keseluruhan, kedua masalah ini adalah cerminan dari pergeseran nilai sosial. Untuk mengatasinya, diperlukan sebuah gerakan revitalisasi semangat kebersamaan melalui edukasi yang berkelanjutan, keteladanan dari tokoh masyarakat, serta penciptaan program-program komunal yang mampu merangsang kembali partisipasi aktif seluruh warga.

4. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum.

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum adalah fondasi bagi stabilitas daerah dan keberhasilan program pembangunan. Permasalahan yang ada bersifat sistemik, menyangkut kelembagaan, SDM, anggaran, dan partisipasi. Untuk memperbaikinya, diperlukan pergeseran paradigma dari melihat Kecamatan hanya sebagai unit administratif menjadi garda terdepan dalam koordinasi kewilayahan dan penjaga harmoni sosial. Penguatan kapasitas dan kewenangan Kecamatan adalah kunci untuk memastikan pemerintah benar-benar ikut berperan di tengah masyarakat.

2.2.3. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dalam dokumen KLHS RPJMD Kota Blitar, terdapat sejumlah isu strategis yang relevan dengan kondisi kewilayahan Kecamatan Sukorejo. Isu-isu tersebut menunjukkan adanya tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan.

Adapun isu-isu strategis KLHS yang teridentifikasi di Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (good governance)

Isu tata kelola pemerintah merujuk pada terciptanya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien dan bebas pungli.

2. Peningkatan keamanan dan kenyamanan kota

Meningkatkan keamanan lingkungan dan meningkatkan ketertiban masyarakat dengan optimalisasi peran lembaga keamanan di tingkat Kecamatan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk memastikan agar kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah senantiasa berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui KLHS, pemerintah kecamatan dapat mengidentifikasi isu-isu lingkungan hidup yang bersifat strategis, menilai dampaknya terhadap aspek sosial, ekonomi, dan tata ruang, serta merumuskan alternatif solusi yang ramah lingkungan.

Di Kecamatan Sukorejo, isu strategis lingkungan hidup yang perlu menjadi perhatian antara lain adalah pengelolaan sampah rumah tangga dan perkotaan, meningkatnya pencemaran lingkungan akibat aktivitas masyarakat, serta berkurangnya ruang terbuka hijau. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan isu rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan sebagaimana teridentifikasi dalam permasalahan kecamatan.

Melalui penerapan KLHS, Kecamatan Sukorejo berkomitmen untuk:

1. Mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap rencana pembangunan, sehingga pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kelestarian alam.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui program bank sampah, kerja bakti, serta lomba lingkungan bersih.
3. Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, seperti dengan Dinas Lingkungan Hidup dan kelurahan, dalam pengelolaan sampah, penghijauan, dan penataan ruang terbuka.
4. Mengembangkan regulasi dan kebijakan ramah lingkungan di tingkat lokal untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, KLHS bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berwawasan lingkungan, pelayanan publik yang lebih hijau, serta masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Kecamatan Sukorejo.

Isu KLHS di Kecamatan Sukorejo yang sejalan dengan peningkatan tata kelola pemerintahan (good governance) adalah bagaimana kecamatan mampu menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta berwawasan lingkungan. Upaya ini mencakup digitalisasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas aparatur, pelibatan masyarakat dalam pembangunan, kejelasan regulasi antar tingkat pemerintahan, hingga integrasi aspek lingkungan dalam setiap kebijakan.

Perumusan terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Blitar merupakan salah satu tahapan penting dalam kajian KLHS. Perumusan isu strategis PB dilakukan dengan cara menggali dan mengkaji data – data sekunder yang

ada seperti dokumen KLHS RTRW, Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Blitar 2025 – 2029 dan berdasarkan identifikasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), serta dokumen kajian lainnya. Selain itu dengan menggali informasi data primer yang dilakukan melalui kegiatan wawancara, diskusi, lokakarya, dan FGD dengan (stakeholders) pihak-pihak yang memiliki kompetensi terhadap kondisi Kota Blitar, baik atas nama individu maupun lembaga. Penyusunan isu strategis menggunakan pertimbangan hasil rumusan skenario dan masukan saran yang disepakati dari kegiatan uji publik yang menghasilkan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis jangka menengah Kota Blitar.

2.2.4. Isu Lingkungan Dinamis (Global, Nasional, dan Regional)

Isu lingkungan dinamis mencakup faktor-faktor global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi arah pembangunan di Kota Blitar, termasuk Kecamatan Sukorejo. Identifikasi isu ini penting untuk memastikan kebijakan daerah tetap adaptif terhadap perubahan eksternal, sekaligus menjaga konsistensi dengan agenda pembangunan provinsi, nasional, dan global.

a. Isu Global

Beberapa isu global yang relevan dengan pembangunan di Kecamatan Sukorejo yang mengacu pada RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, yaitu Segala sesuatu adalah layanan. Everything is a Service (EIS) adalah pandangan yang menegaskan bahwa semua sesuatu, baik itu produk, layanan, atau teknologi, sebenarnya adalah sebuah layanan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam EIS, layanan diartikan sebagai suatu bentuk interaksi antara pihak-pihak yang terkait, seperti konsumen dan penyedia layanan, untuk mencapai tujuan tertentu. Layanan dapat berupa produk, jasa, atau teknologi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Manfaat EIS: meningkatkan kualitas layanan dengan cara memfokuskan pada kebutuhan dan keinginan konsumen; meningkatkan efisiensi dengan cara mengintegrasikan proses-proses bisnis dan mengurangi biaya; dan meningkatkan keamanan dengan cara melindungi data dan informasi konsumen. Konsep "Segala Sesuatu adalah Layanan" menegaskan bahwa semua sesuatu sebenarnya adalah sebuah layanan yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.

Kecamatan Sukorejo, sebagai bagian dari Kota Blitar, tidak terlepas dari pengaruh isu global yang dinamis. Perubahan iklim, urbanisasi, transformasi digital, tuntutan good governance, hingga agenda global SDGs (*Sustainable Development Goals*) menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kecamatan untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kapasitas aparatur, dan memberdayakan masyarakat. Dengan memahami isu global ini, kecamatan dapat merumuskan langkah-langkah pembangunan yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan selaras dengan perkembangan dunia.

b. Isu Nasional

Berdasarkan RPJMN 2025–2029 serta Asta Cita pembangunan nasional, isu-isu nasional yang memengaruhi Sukorejo meliputi:

1. Program pemberdayaan yang belum terintegrasi untuk peningkatan kemandirian masyarakat.
 2. Tata kelola pemerintahan desa belum baik.
- c. Isu Regional (Provinsi Jawa Timur):

Mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025–2029, isu-isu regional yang relevan dengan Sukorejo adalah:

1. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Kota Blitar, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Blitar yang profesional dan bebas korupsi.
2. Peningkatan pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan.
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pengembangan manfaat aset daerah di dukung kebijakan penambahan aset daerah.
4. Peningkatan profesionalitas ASN.

Isu lingkungan dinamis di Kecamatan Sukorejo merupakan akumulasi dari tekanan global, tantangan nasional, serta isu regional Jawa Timur. Oleh karena itu, pembangunan Kecamatan Sukorejo harus diarahkan untuk memperkuat memperkuat tata kelola pemerintah daerah .

2.2.5. Isu-isu Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sukorejo

Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya. Isu Strategis pada Kecamatan Sukorejo :

1. Rendahnya swadaya masy. dalam penyelenggaran Trantibum dan menjaga lingkungan.
2. Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pencapaian layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan penanganan pengaduan.
4. Belum optimalnya kualitas penyelenggaran pemerintahan umum.

Berdasarkan analisis potensi, permasalahan, serta isu KLHS dan lingkungan dinamis, disimpulkan beberapa isu strategis utama yang perlu ditangani oleh Kecamatan Sukorejo dalam Renstra periode 2025-2029, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6.
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1. Potensi Agrowisata dan Pertanian Perkotaan dimana Kecamatan Sukorejo memiliki	1. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik belum optimal, sehingga beberapa proses masih manual.	1.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (good governance). 2.Peningkatan keamanan dan	Segala sesuatu adalah layanan	1. Program pemberdayaan yang belum terintegrasi untuk peningkatan kemandirian masyarakat.	1.Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Kota Blitar, menuju	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan penanganan pengaduan secara

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
keunggulan sebagai sentra Belimbing Merah Karangsari. 2. Tingginya Kepadatan Penduduk Kecamatan Sukorejo sebagai Pasar Potensial merupakan pasar yang besar dan potensial untuk pengembangan sektor perdagangan, jasa, dan UMKM. 3. Luas cakupan wilayah yg relatif kecil apabila dibandingkan Kabupaten memudahkan penyelenggaraan Trantibum. 4. Tersedianya sarana dan prasarana untuk akses internet dalam mendukung pelayanan publik.	2. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan belum merata. 3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. 4. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum.	kenyamanan kota		2. Tata kelola pemerintahan desa belum baik.	penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Blitar yang profesional dan bebas korupsi. 2. Peningkatan pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan. 3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pengembangan manfaat aset daerah di dukung kebijakan penambahan aset daerah. 4. Peningkatan profesionalitas ASN.	terintegrasi. 2. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum. 3. Rendahnya swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan menjaga lingkungan. 4. Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pencapaian layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. 5. Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah

Sumber : Kecamatan Sukorejo , 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sukorejo merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD Kota Blitar Tahun 2025–2029. Tujuan ditetapkan sebagai implementasi misi yang akan dicapai, sedangkan sasaran merupakan hasil yang lebih terukur dan spesifik. Perumusan ini didasarkan pada analisis pohon kinerja, isu strategis daerah, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku bagi kewenangan kecamatan. Tujuan utama Kecamatan Sukorejo adalah mendukung terwujudnya visi Walikota Blitar terpilih :

“KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN”.

Hal tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran spesifik yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur di tingkat kewilayahan. Indikator kinerja yang ditetapkan bersifat terukur untuk memastikan setiap sasaran dapat dievaluasi pencapaiannya secara tahunan hingga akhir periode Renstra. Walikota Blitar terpilih memiliki 5 (lima) Misi :

1. Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis
2. Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera
3. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis Smart Governance
4. Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter
5. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri

Kecamatan Sukorejo mengemban Misi yang ke-3 (tiga), yaitu :

“Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis Smart Governance”

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sukorejo

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Sukorejo Kota Blitar adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan”. Tujuan Kecamatan Sukorejo adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan (IKU)

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur dan spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai, sehingga diharapkan dengan tercapainya sasaran maka tujuan juga telah dicapai. Berdasarkan uraian tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah Kecamatan Sukorejo sebagai berikut dan dijabarkan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan; dan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah

Tabel 3.1.
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NO.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN							KETERANGAN
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	AKHIR PERIODE	
								TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	URUSAN KEWILAYAHAN														
	SASARAN RPJMD : Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	TUJUAN : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 9 variabel yaitu Persyaratan, Sistem, mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Biaya/ tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan, Sarana dan prasarana sesuai PermenPAN RB no 14 tahun 2017 yang dihitung sesuai aplikasi e-sukma Provinsi Jawa Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun berjalan hasil e-sukma	89,10	89,15	89,20	89,25	89,30	89,35	89,40	89,40	IKU
			SASARAN : Meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan	Status Kinerja Kecamatan	Status kinerja kecamatan adalah hasil evaluasi atas instrumen penilaian sinergitas kinerja kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik di kecamatan, Instrumen penilaian tersebut mencakup 10 indikator kinerja pelayanan publik tingkat kecamatan dan 7 indikator kinerja koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan berdasarkan PP no. 17 tahun 2018 Status kinerja kecamatan diperoleh dari evaluasi Provinsi Jawa timur	Status kinerja kecamatan pada tahun berjalan berdasarkan evaluasi provinsi	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	IKU
				Persentase kelurahan dengan tingkat perkembangan "cepat berkembang"	Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan adalah penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan melalui isian formulir evaluasi diri yang ada didalam aplikasi epdeskel berdasarkan Permendagri no. 81 tahun 2015 evaluasi epdeskel terdiri dari 3 kategori yaitu kelurahan dengan tingkat perkembangan "kurang berkembang", "berkembang" dan "cepat berkembang" dengan kategori tertinggi adalah "cepat berkembang"	(Jumlah kelurahan dengan tingkat perkembangan "cepat berkembang" dibagi jumlah seluruh kelurahan) x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU
2	SASARAN RPJMD : Terwujudnya		SASARAN : Meningkatkan kualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan	IKM = Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25 NRR IKM Tertimbang	84,80	84,85	84,90	84,95	85,00	85,10	85,15	85,15	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan strategi pembangunan yaitu :

- 1. Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan publik serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
- 2. Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintahan dan profesionalisme ASN

Dengan memperhatikan strategi pembangunan di atas, maka kebijakan pembangunan diarahkan untuk penguatan peran kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan sebagai garda depan pelayanan kepada masyarakat, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Kecamatan Sukorejo 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.2.
Teknik Merumuskan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
Tata kelola pemerintahan yang tepat fungsi dan penyederhaaan regulasi dengan fokus Penataan kelembagaan yang tepat fungsi, manajemen ASN sesuai kompetensinya.	Belum optimalnya kualitas pelayanan dan penanganan pengaduan secara terintegrasi.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik melalui pengembangan sistem layanan digital dan integrasi data pelayanan masyarkat.
	belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Rendahnya swadaya masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibum dan menjaga lingkungan.	Pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
		Peningkatan Koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan trantibum.
	Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pencapaian layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan.
		Peningkatan kualitas pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
	Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan

Sumber : Kecamatan Sukorejo , 2025

Tabel 3.3.
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Layanan Dasar dan Infrastruktur Kecamatan untuk Mendukung SDM Unggul dan Pembangunan Berkelanjutan	Mewujudkan Kecamatan Cerdas melalui Tata Kelola Digital dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Inovasi dan Kolaborasi Kecamatan dalam Mewujudkan Kesejahteraan yang Merata	Optimalisasi Potensi Ekonomi Lokal dalam Mendukung Stabilitas ekonomi menuju kota yang maju	Akselerasi Pembangunan Kecamatan Berbasis Kesejahteraan, Inovasi Ekonomi, dan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Sumber : Kecamatan Sukorejo , 2025

Tabel 3.4.

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK (Kewenangan Kecamatan Sesuai UU 23/2014)	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sukorejo	Keterangan
1.	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum serta mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.	Peningkatan pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi informasi	Optimalisasi fasilitasi pelayanan agraria, pengelolaan tanah dan aset daerah, penyelenggaraan pemilu, serta peningkatan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	Dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi rutin dengan TNI/Polri, Pol.PP, BPKAD dan tokoh masyarakat.
			Penguatan kapasitas dan pembinaan berkelanjutan bagi pengurus RT/RW dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling bawah.	
		Penguatan kelembagaan dan integrasi lintas sektor di posyandu untuk mendukung 6 (enam) layanan dasar	Penguatan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam rangka menjaga stabilitas wilayah dan mendukung ketenteraman serta ketertiban masyarakat.	
			Peningkatan sinergi dan kolaborasi melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk memperkuat deteksi dini serta menjaga kerukunan sosial-keagamaan di masyarakat.	
			Penyusunan SOP Bersama dalam rangka optimalisasi system respon cepat penanganan transtibum.	
			Sosialisasi tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat.	
2.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.		Optimalisasi aplikasi pelayanan publik (Sitarjo, Silpusitron dan A Data).	Kecamatan berperan sebagai koordinator dan fasilitator, bukan sebagai penyelenggara langsung urusan
			Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar.	
3.	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.		Mendorong pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara partisipatif sebagai wadah utama penyerapan aspirasi masyarakat.	Fokus pada peningkatan kualitas usulan dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan (Musrenbang)
			Menyelenggarakan berbagai program pelatihan keterampilan yang relevan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, serta menumbuhkan semangat wirausaha dan pengembangan UMKM lokal.	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar.	

No	Operasionalisasi NSPK (Kewenangan Kecamatan Sesuai UU 23/2014)	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sukorejo	Keterangan
4.	Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.		Memfasilitasi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana umum yang mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan masyarakat secara berkelanjutan.	Kecamatan memastikan aspirasi infrastruktur dari masyarakat terakomodasi dalam perencanaan kota.
5.	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain.		Peningkatan ekonomi Masyarakat melalui kegiatan promosi.	Mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi lokal yang ada di wilayah Kecamatan.
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan.	
			Fasilitasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.	
6.	Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan.	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi.	Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.	Memastikan keseragaman dan kualitas tata kelola di seluruh kelurahan di bawah wilayah Kecamatan Sukorejo.
			Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku.	
			Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan.	

Sumber : Kecamatan Sukorejo , 2025

Tabel 3.5.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN			
Misi : Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan	1.Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik melalui pengembangan sistem layanan digital dan integrasi data pelayanan masyarakat.	Optimalisasi aplikasi pelayanan publik (Sitarjo, Silpusitron dan A Data).
			Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan yang sesuai standar.
		2.Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Optimalisasi fasilitasi pelayanan agraria, pengelolaan tanah dan aset daerah, penyelenggaraan pemilu, serta peningkatan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
			Penguatan kapasitas dan pembinaan berkelanjutan bagi pengurus RT/RW dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling bawah.

Visi : KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN			
Misi : Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.Pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.	Sosialisasi tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
		4.Peningkatan Koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan Trantibum.	Penguatan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam rangka menjaga stabilitas wilayah dan mendukung ketenteraman serta ketertiban masyarakat
			Peningkatan sinergi dan kolaborasi melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk memperkuat deteksi dini serta menjaga kerukunan sosial-keagamaan di masyarakat.
			Penyusunan SOP Bersama dalam rangka optimalisasi system respon cepat penanganan trantibum.
		5.Peningkatan kualitas pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	Peningkatan ekonomi Masyarakat melalui kegiatan promosi.
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan.
			Fasilitasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
		6.Peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif dan berkelanjutan.	Mendorong pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara partisipatif sebagai wadah utama penyerapan aspirasi masyarakat.
			Menyelenggarakan berbagai program pelatihan keterampilan yang relevan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, serta menumbuhkan semangat wirausaha dan pengembangan UMKM lokal.
			Memfasilitasi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana umum yang mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan masyarakat secara berkelanjutan.
	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
			Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku.
			Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan.

Sumber : Kecamatan Sukorejo , 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Kota Blitar yang telah ditetapkan, serta untuk merealisasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sukorejo tahun 2025-2029, maka disusunlah program, kegiatan, sub kegiatan target kinerja serta target pendanaan indikatif. Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bab sebelumnya, langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Kecamatan Sukorejo dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025-2029.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Kecamatan Sukorejo dalam lima tahun mendatang.

Adapun program dan kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Sukorejo selama lima tahun yang sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Kecamatan Sukorejo adalah dengan menyusun Program pembangunan dalam lima tahun mendatang yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan Kecamatan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan Kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Dari program – program tersebut dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan.

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada kinerja indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti aparatur kelurahan dan lembaga masyarakat serta masyarakat.

Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja Kecamatan Sukorejo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
URUSAN KEWILAYAHAN							
	TUJUAN : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kecamatan		
SASARAN RPJMD : Terwujudnya manajemen pemerintahan yang profesional		SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
			Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	7.01.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	7.01.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SASARAN RPJMD : Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi		Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan			Status Kinerja Kecamatan		
					Persentase kelurahan dengan tingkat perkembangan "cepat berkembang"		
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan		Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum		
					Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya		
				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti		
					Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan		
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Pembangunan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur kota yang ramah publik dan lingkungan 2. Optimalisasi program RT KEREN menjadi KARYA MAS (Kelurahan Berdaya Menuju Kota Masa Depan) dengan meningkatkan kemanfaatan bagi warga masyarakat 3. Penguatan peran kampung wisata dan membangun objek wisata baru 4. Normalisasi Drainase Perkotaan, Normalisasi Sungai untuk peningkatan fungsi irigasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							dan Sanitasi Perkotaan 5. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum
					Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM		
					Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif		
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan		
				Terlaksananya Musrenbang Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
				Terlaksananya pembangunan/ pemeliharaan sarpras lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya fasilitasi lembaga masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Terlaksananya pemberdaayaan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

Sumber : Kecamatan Sukorejo, 2025

Tabel 4.2.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
7.01 - KECAMATAN							28.131.0 72.505,0 0		28.151.5 61.306,0 0		28.609.1 02.274,0 0		28.200.9 08.406,0 0		29.054. 850.863 ,00		29.054. 850.863		
KECAMATAN SUKOREJO																			
TUJUAN : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kecamatan (Indek	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 9 variabel yaitu Persyaratan, Sistem, mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Biaya/ tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan, Sarana dan prasarana sesuai PermenPAN RB no 14 tahun 2017 yang dihitung sesuai aplikasi e- sukma Provinsi Jawa Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun berjalan hasil e-sukma	89,10	89,20		89,2 5		89,3 0		89,3 5		89,4 0		89,40			
SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat internal atas pelayanan sekretariat sesuai PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	IKM = Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25 NRR IKM Tertimbang = NRR per unsur x (0,111) NRR per unsur = jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah responden NRR = Nilai rata-rata	84,8	84,9		84,9 5		85		85,1		85,1 5		85,15			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Layanan kedinasan sesuai standar adalah layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah kepada pengguna layanan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan	Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku ----- x 100% Jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang diberikan	100	100	14.016.1 99.797,0 0	100	14.036.6 88.598,0 0	100	14.494.2 29.566,0 0	100	14.086.0 35.698,0 0	100	14.939. 978.155 ,00	100	71.573. 131.814 ,00	7.01.0.00. 0.00.02.0 000 - Kecamata n Sukorejo	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	Jumlah jenis dokumen tepat waktu dan sesuai standar pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	100	100	12.254.1 00,00	100	12.254.1 00,00	100	12.254.1 00,00	100	12.254.1 00,00	100	12.254. 100,00	100	61.270. 500,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	3	3	3.439.000,00	3	3.439.000,00	3	3.439.000,00	3	3.439.000,00	3	3.439.000,00	15	17.195.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran/tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	7	7	3.315.100,00	7	3.315.100,00	7	3.315.100,00	7	3.315.100,00	7	3.315.100,00	35	16.575.500,00		
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data statistik sektoral merupakan hasil pendataan statistik sektoral yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai SOP pengumpulan data statistik sektoral yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani statistik	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah pada tahun berjalan	1	1	1.375.000,00	1	2.750.000,00	1	2.750.000,00	1	2.750.000,00	1	2.750.000,00	5	12.375.000,00		
7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan kegiatan pembahasan rancangan Renstra dan rancangan Renja Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan terkait	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	0	1	1.375.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.375.000		
7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selain Renstra dan Renja yaitu meliputi perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, standar pelayanan, rencana dan dokumen anggaran, dokumen pengarusutamaan gender, profil perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun tahun berjalan	11	11	1.375.000,00	11	2.750.000,00	11	2.750.000,00	11	2.750.000,00	11	2.750.000,00	55	12.375.000,00		
7.01.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui	Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan merupakan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP tahun berjalan dan kebijakan daerah yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah tahun berjalan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional tahun berjalan	0	1	1.375.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.375.000,00		

[illegible]

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
7.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah memuat laporan pengelolaan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ----- x 100% Jumlah jenis administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah yang harus disediakan			900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00		4.500.000,00		
7.01.01.2.04.000 7 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan retribusi daerah memuat penyusunan pendataan, pemungutan, dan penyusunan laporan realisasi retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada tahun n	14	14	900.000,00	14	900.000,00	14	900.000,00	14	900.000,00	14	900.000,00	70	4.500.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kepegawaian serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	100	100	68.600.500,00	100	68.600.500,00	100	68.600.500,00	100	68.600.500,00	100	68.600.500,00	100	343.002.500,00		
7.01.01.2.05.000 2 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/kostum untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	3	3	46.600.500,00	3	46.600.500,00	3	46.600.500,00	3	46.600.500,00	3	46.600.500,00	15	233.002.500,00		
7.01.01.2.05.001 0 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	125	125	22.000.000,00	125	22.000.000,00	125	22.000.000,00	125	22.000.000,00	125	22.000.000,00	625	110.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	306.182.450,00	100	306.182.450,00	100	306.182.450,00	100	306.182.450,00	100	306.182.450,00	100	1.530.912.250,00		
7.01.01.2.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1	1	12.070.600,00	1	12.070.600,00	1	12.070.600,00	1	12.070.600,00	1	12.070.600,00	5	60.353.000,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
an Bangunan Kantor	Bangunan Kantor	Kantor yang Disediakan	yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Disediakan pada tahun berjalan															
7.01.01.2.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	8	8	53.435.600,00	8	53.435.600,00	8	53.435.600,00	8	53.435.600,00	8	53.435.600,00	40	267.178.000,00		
7.01.01.2.06.000 3 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	3	3	30.320.300,00	3	30.320.300,00	3	30.320.300,00	3	30.320.300,00	3	30.320.300,00	15	151.601.500,00		
7.01.01.2.06.000 4 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	2	2	102.925.500,00	2	102.925.500,00	2	102.925.500,00	2	102.925.500,00	2	102.925.500,00	10	514.627.500,00		
7.01.01.2.06.000 5 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	2	2	24.709.650,00	2	24.709.650,00	2	24.709.650,00	2	24.709.650,00	2	24.709.650,00	10	123.548.250,00		
7.01.01.2.06.000 6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	24	24	6.460.200,00	24	6.460.200,00	24	6.460.200,00	24	6.460.200,00	24	6.460.200,00	120	32.301.000,00		
7.01.01.2.06.000 9 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mencakup perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	12	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	60	375.000.000,00		
7.01.01.2.06.001 0 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1	1	1.260.600,00	1	1.260.600,00	1	1.260.600,00	1	1.260.600,00	1	1.260.600,00	5	6.303.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	100	100	41.660.600,00	100	101.660.600,00	100	101.660.600,00	100	101.660.600,00	100	101.660.600,00	100	448.303.000,00		
7.01.01.2.07.000 5 - Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	0	53	13.529.700,00	4	13.529.700,00	4	13.529.700,00	4	13.529.700,00	4	13.529.700,00	20	67.648.500,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
7.01.01.2.07.000 6 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	2	2	28.130.900,00	2	28.130.900,00	2	28.130.900,00	2	28.130.900,00	2	28.130.900,00	10	140.654.500,00		
7.01.01.2.07.000 7 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Aset Tetap Lainnya yang Disediakan mencakup hewan, tumbuhan, alat kesenian, koleksi perpustakaan yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	1	0	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	5	40.000.000,00		
7.01.01.2.07.001 1 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan mencakup ruangan dalam gedung kantor termasuk jaringan internet, listrik, telepon serta sarana dan prasarana luar gedung kantor yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	1	0	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	5	200.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	100	100	1.540.466.540,00	100	1.545.466.540,00	100	1.545.466.540,00	100	1.545.466.540,00	100	1.545.466.540,00	100	7.722.332.700,00		
7.01.01.2.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	5	5	49.067.040,00	5	49.067.040,00	5	49.067.040,00	5	49.067.040,00	5	49.067.040,00	25	245.335.200,00		
7.01.01.2.08.000 3 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor memuat kegiatan persewaan peralatan dan perlengkapan yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	0	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	5	20.000.000,00		
7.01.01.2.08.000 4 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat kegiatan penyediaan dan pembayaran gaji, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi tenaga pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	12	12	1.491.399.500,00	12	1.491.399.500,00	12	1.491.399.500,00	12	1.491.399.500,00	12	1.491.399.500,00	60	7.456.997.500,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik	Persentase Barang Milik Daerah yang	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan	100	100	685.674.400,00	100	620.674.400,00	100	620.674.400,00	100	620.674.400,00	100	620.674.400,00	100	3.168.372.000,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	daerah penunjang urusan	terpelihara sesuai kebutuhan	perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMDBMD	----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara															
7.01.01.2.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya adalah kendaraan jabatan yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMDBMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada tahun berjalan	1	1	31.168.300,00	1	31.168.300,00	1	31.168.300,00	1	31.168.300,00	1	31.168.300,00	5	155.841.500,00		
7.01.01.2.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMDBMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	9	9	56.162.700,00	9	56.162.700,00	9	56.162.700,00	9	56.162.700,00	9	56.162.700,00	45	280.813.500,00		
7.01.01.2.09.000 5 - Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel yang dipelihara adalah mebel aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMDBMD	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	1	0	-	1	686.000,00	1	686.000,00	1	686.000,00	1	686.000,00	5	#VALUE!		
7.01.01.2.09.000 6 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMDBMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	10	10	28.849.000,00	10	28.849.000,00	10	28.849.000,00	10	28.849.000,00	10	28.849.000,00	50	144.245.000,00		
7.01.01.2.09.000 7 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Aset tetap lainnya yang dipelihara adalah aset perangkat daerah berupa hewan, tumbuhan, alat kesenian dan buku perpustakaan yang diperlihara sesuai RKPBMDBMD	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	1	0	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	5	#VALUE!		
7.01.01.2.09.000 8 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Aset tak berwujud yang dipelihara adalah aplikasi/website yang dipelihara sesuai RKPBMDBMD	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara pada tahun berjalan	1	1	15.101.100,00	1	15.101.100,00	1	15.101.100,00	1	15.101.100,00	1	15.101.100,00	5	75.505.500,00		
7.01.01.2.09.001 1 - Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMDBMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	18	18	554.393.300,00	18	483.707.300,00	18	483.707.300,00	18	483.707.300,00	18	483.707.300,00	90	2.489.222.500,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya			Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan															
Sasaran : Meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan kualitas pembangunan wilayah di kecamatan	Status Kinerja Kecamatan	Status kinerja kecamatan adalah hasil evaluasi atas instrumen penilaian sinergitas kinerja kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik di kecamatan, Instrumen penilaian tersebut mencakup 10 indikator kinerja pelayanan publik tingkat kecamatan dan 7 indikator kinerja koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan berdasarkan PP no. 17 tahun 2018 Status kinerja kecamatan diperoleh dari evaluasi Provinsi Jawa timur	Status kinerja kecamatan pada tahun berjalan berdasarkan evaluasi provinsi	BAIK	BAIK		BAIK		BAIK		BAIK		BAIK		BAIK			
		Persentase kelurahan dengan tingkat perkembangan "cepat berkembang"	Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan adalah penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan melalui isian formulir evaluasi diri yang ada didalam aplikasi epdeskel berdasarkan Permendagri no. 81 tahun 2015 evaluasi epdeskel terdiri dari 3 kategori yaitu kelurahan dengan tingkat perkembangan "kurang berkembang", "berkembang" dan "cepat berkembang" dengan kategori tertinggi adalah "cepat berkembang"	(Jumlah kelurahan dengan tingkat perkembangan "cepat berkembang" dibagi jumlah seluruh kelurahan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggara n pemerintahan	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	Pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan adalah pelayanan kecamatan/kelurahan sesuai SPP dan SOP Pelayanan yang diselesaikan adalah pelayanan kependudukan dan fasilitas pelayanan umum, yang diselesaikan sesuai kewenangan kecamatan/kelurahan berdasarkan SP dan SOP. Pengaduan yang diselesaikan adalah pengaduan yang dilaporkan melalui front-office pelayanan kecamatan/kelurahan yang diselesaikan ditingkat kecamatan/kelurahan atau yang ditindaklanjuti dengan koordinasi pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan SOP Pengaduan	Rata-rata Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase pelayanan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengajuan pelayanan yang diselesaikan dibagi Jumlah pengajuan pelayanan dikali 100% Persentase pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengaduan	100	100	2.150.23 8.384,00	100	2.150.23 8.384,00	100	2.150.23 8.384,00	100	2.150.23 8.384,00	100	2.150.2 38.384, 00	100	10.751. 191.920 ,00	7.01.0.00. 0.00.02.0 000 - Kecamatan Sukorejo	

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
		Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum	Kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya adalah kelurahan yang memiliki poskampling yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat	(Jumlah Kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya / jumlah seluruh kelurahan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya	Kelurahan yang masyarakatnya tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum adalah masyarakat yang tertib membayar PBB-P2 dan Sewa Tanah aset berupa lahan pertanian	(Jumlah Kelurahan yang masyarakatnya tertib membayar PBB-P2 dan Sewa Tanah aset berupa lahan pertanian / jumlah seluruh kelurahan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraa n pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan adalah seluruh kegiatan pemerintahan umum (Administrasi Pertanahan, Persewaan tanah aset, Fasilitas Pemilu, Pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan, Fasilitas pembayaran PBB, dan Fasilitas Koordinasi Forkopimcam) yang dilakukan oleh Kecamatan dalam periode tertentu.	(Jumlah kegiatan penyele ngaraan pemerintahan yan g telah dilaksanakan / Jumlah total rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan) x 100%	100	100	320.694.200,00	100	320.694.200,00	100	320.694.200,00	100	320.694.200,00	100	320.694.200,00	100	1.603.471.000,00		
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Gangguan trantibum yang ditindaklanjuti adalah setiap kejadian yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat, baik yang bersifat sosial, lingkungan, maupun administratif, yang telah direspons atau ditangani oleh Kecamatan melalui tindakan preventif, persuasif, atau represif sesuai prosedur yang berlaku.	(Jumlah gangguan trantibum yang ditindaklanjuti / Jumlah seluruh gangguan trantibum) x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan	Cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan adalah luasan wilayah Kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum).	(Jumlah luasan wilayah kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) / Jumlah luasan wilayah di Kecamatan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat) dan Jumlah kegiatan masyarakat) dan Jumlah	Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat) dan Jumlah laporan hasil koordinasi	2	2	66.768.000,00	2	66.768.000,00	2	66.768.000,00	2	66.768.000,00	2	66.768.000,00	10	333.840.000,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Instansi Vertikal Terkait	laporan hasil koordinasi penanganan pengaduan trantibum yang dilaksanakan	penanganan pengaduan trantibum															
7.01.02.2.01.000 2 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan adalah Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah; Jumlah dokumen perjanjian sewa tanah aset berupa lahan pertanian yang terbit dalam tahun berkenaan dan Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pemilu di tahun berkenaan ; Jumlah laporan kegiatan pembinaan Wasbang yang difasilitasi ; Jumlah laporan pembayaran PBB; dan Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dengan forkopimcam pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah; Jumlah dokumen perjanjian sewa tanah aset berupa lahan pertanian yang terbit dalam tahun berkenaan dan Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pemilu di tahun berkenaan ; Jumlah laporan kegiatan pembinaan Wasbang yang difasilitasi ; Jumlah laporan pembayaran PBB; dan Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dengan forkopimcam pada tahun berkenaan	12	12	253.926.200,00	12	253.926.200,00	12	253.926.200,00	12	253.926.200,00	12	253.926.200,00	60	1.269.631.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pelayanan kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses dalam internal kecamatan/kelurahan dan yang disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai SOP dan SPP.	(Jumlah kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan) x 100%	100	100	79.910.680,00	100	79.910.680,00	100	79.910.680,00	100	79.910.680,00	100	79.910.680,00	100	399.553.400,00		
		Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara	sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara adalah fasilitas pelayanan yang disediakan dan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada untuk kelancaran dan kenyamanan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	(Jumlah sarpras yang disediakan atau dipelihara/jumlah sarpras standar pelayanan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.02.000 1 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan memuat dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat memuat SOP, SP, IKM, ISO	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat pada tahun berjalan	2	2	21.745.600,00	2	21.745.600,00	2	21.745.600,00	2	21.745.600,00	2	21.745.600,00	10	108.728.000,00		
7.01.02.2.02.000 3 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sistem Informasi pelayanan yang terbangun/terpeliharaan adalah pembangunan atas sistem informasi yang belum terbangun dan pemeliharaan atas sistem informasi yang sudah ada yang digunakan guna menunjang kelancaran pelayanan secara online ; SDM pelayanan adalah personil yang terlibat dalam proses	Jumlah sistem informasi yang ada atau akan di bangun; Jumlah SDM pelayanan yang ada; Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada	7	7	58.165.080,00	7	58.165.080,00	7	58.165.080,00	7	58.165.080,00	7	58.165.080,00	35	290.825.400,00		

[illegible]

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
		yang dilaksanakan		yang seharusnya dilaksanakan)x 100%															
7.01.03.2.02.000 1 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	2	2	65.918.400,00	2	65.918.400,00	2	65.918.400,00	2	65.918.400,00	2	65.918.400,00	10	329.592.000,00		
7.01.03.2.02.000 2 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan / pemeliharaan sarpras lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang di usulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	7	7	230.000.000,00	7	230.000.000,00	7	230.000.000,00	7	230.000.000,00	7	230.000.000,00	35	1.150.000.000,00		
7.01.03.2.02.000 3 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan pada seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	4	4	467.616.680,00	4	467.616.680,00	4	467.616.680,00	4	467.616.680,00	4	467.616.680,00	20	2.338.083.400,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan /Kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	100	100	346.104.450,00	100	346.104.450,00	100	346.104.450,00	100	346.104.450,00	100	346.104.450,00	100	1.730.522.250,00		
7.01.03.2.03.000 2 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya fasilitasi lembaga masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga masyarakat yang difasilitasi dengan anggaran pada Seksi Ekokesra	Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi pada tahun berjalan	4	4	209.263.300,00	4	209.263.300,00	4	209.263.300,00	4	209.263.300,00	4	209.263.300,00	20	1.046.316.500,00		
7.01.03.2.03.000 4 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdaayaan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan pada seksi perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat pada tahun berjalan	3	3	136.841.150,00	3	136.841.150,00	3	136.841.150,00	3	136.841.150,00	3	136.841.150,00	15	684.205.750,00		
KELURAHAN PAKUNDEN																0,00			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Layanan kedinasan sesuai standar adalah layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah kepada pengguna layanan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan	Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku x 100% Jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang diberikan	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran,	Meningkatnya kualitas dokumen	Persentase penyusunan dokumen	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang	100	100	1.890.000,00	100	1.890.000,00	100	1.890.000,00	100	1.890.000,00	100	1.890.000,00	100	9.450.000,00	7.01.0.00.0.00.02.001 -	

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	tersusun tepat waktu dan sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun														Kelurahan Pakunden	
7.01.01.2.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	3	3	630.000,00	3	630.000,00	3	630.000,00	3	630.000,00	3	630.000,00	15	3.150.000,00		
7.01.01.2.01.000 7 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran/tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	7	7	1.260.000,00	7	960.000,00	7	960.000,00	7	960.000,00	7	960.000,00	35	5.100.000,00		
7.01.01.2.01.000 9 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data statistik sektoral merupakan hasil pendataan statistik sektoral yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai SOP pengumpulan data statistik sektoral yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani statistik	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah pada tahun berjalan	1	1	-	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	5	#VALUE!		
7.01.01.2.01.001 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selain Renstra dan Renja yaitu meliputi perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, standar pelayanan, rencana dan dokumen anggaran, dokumen pengarusutamaan gender, profil perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun tahun berjalan	11	11	-	11	100.000,00	11	100.000,00	11	100.000,00	11	100.000,00	55	#VALUE!		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- - x 100 % Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	100	100	1.260.000,00	100	1.260.000,00	100	1.260.000,00	100	1.260.000,00	100	1.260.000,00	100	6.300.000,00		
7.01.01.2.02.000 7 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	Laporan keuangan memuat laporan keuangan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	9	9	1.260.000,00	9	1.260.000,00	9	1.260.000,00	9	1.260.000,00	9	1.260.000,00	45	6.300.000,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	100	100	7.650.00 0,00	100	7.650.00 0,00	100	7.650.00 0,00	100	7.650.00 0,00	100	7.650.0 00,00	100	38.250. 000,00		
7.01.01.2.05.000 2 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/kostum untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	3	3	7.650.00 0,00	3	7.150.00 0,00	3	7.150.00 0,00	3	7.150.00 0,00	3	7.150.0 00,00	15	36.250. 000,00		
7.01.01.2.05.001 0 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	40	0	0	40	500.000, 00	40	500.000, 00	40	500.000, 00	40	500.000 ,00	200	2.000.0 00,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	43.731.3 00,00	100	43.731.3 00,00	100	43.731.3 00,00	100	43.731.3 00,00	100	43.731. 300,00	100	218.656 .500,00		
7.01.01.2.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	2.615.20 0,00	1	2.615.20 0,00	1	2.615.20 0,00	1	2.615.20 0,00	1	2.615.2 00,00	5	13.076. 000,00		
7.01.01.2.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	8	8	12.043.9 00,00	8	12.043.9 00,00	8	12.043.9 00,00	8	12.043.9 00,00	8	12.043. 900,00	40	60.219. 500,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
7.01.01.2.06.000 3 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	3	3	3.774.10 0,00	3	3.774.10 0,00	3	3.774.10 0,00	3	3.774.10 0,00	3	3.774.1 00,00	15	18.870. 500,00		
7.01.01.2.06.000 4 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	2	2	16.200.0 00,00	2	16.200.0 00,00	2	16.200.0 00,00	2	16.200.0 00,00	2	16.200. 000,00	10	81.000. 000,00		
7.01.01.2.06.000 5 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	2	2	4.466.10 0,00	2	4.466.10 0,00	2	4.466.10 0,00	2	4.466.10 0,00	2	4.466.1 00,00	10	22.330. 500,00		
7.01.01.2.06.000 6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	24	24	3.912.00 0,00	24	3.912.00 0,00	24	3.912.00 0,00	24	3.912.00 0,00	24	3.912.0 00,00	120	19.560. 000,00		
7.01.01.2.06.001 0 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	1	1	720.000, 00	1	720.000, 00	1	720.000, 00	1	720.000, 00	1	720.000 ,00	5	3.600.0 00,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	100	100	29.730.1 00,00	100	29.730.1 00,00	100	29.730.1 00,00	100	29.730.1 00,00	100	29.730. 100,00	100	148.650 .500,00		
7.01.01.2.07.000 5 - Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	-	1	5.000.00 0,00	1	5.000.00 0,00	1	5.000.00 0,00	1	5.000.0 00,00	5	#VALUE !		
7.01.01.2.07.000 6 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	2	2	29.730.1 00,00	2	24.730.1 00,00	2	24.730.1 00,00	2	24.730.1 00,00	2	24.730. 100,00	10	128.650 .500,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar	100	100	29.398.0 00,00	100	29.398.0 00,00	100	29.398.0 00,00	100	29.398.0 00,00	100	29.398. 000,00	100	146.990 .000,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
Pemerintahan Daerah			pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	----- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan															
7.01.01.2.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	12	12	29.398.000,00	12	29.398.000,00	12	29.398.000,00	12	29.398.000,00	12	29.398.000,00	60	146.990.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMDB	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	100	100	26.030.700,00	100	26.030.700,00	100	26.030.700,00	100	26.030.700,00	100	26.030.700,00	100	130.153.500,00		
7.01.01.2.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMDB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	9	9	2.430.000,00	9	2.430.000,00	9	2.430.000,00	9	2.430.000,00	9	2.430.000,00	45	12.150.000,00		
7.01.01.2.09.000 5 - Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel yang dipelihara adalah mebel aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMDB	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	0	0	-	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	5	#VALUE!		
7.01.01.2.09.000 6 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMDB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	10	10	8.600.700,00	10	8.600.700,00	10	8.600.700,00	10	8.600.700,00	10	8.600.700,00	50	43.003.500,00		
7.01.01.2.09.001 1 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMDB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	9	9	15.000.000,00	9	14.900.000,00	9	14.900.000,00	9	14.900.000,00	9	14.900.000,00	45	74.600.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggara	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan	Pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan adalah pelayanan	Rata-rata Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	100	100		100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.001 -	

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
		ekonomi produktif	sarpras untuk 6 bidang pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum dan sosial sesuai Permendagri No. 100 tahun 2018	dilaksanakan dibagi 6 dikalikan 100%															
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	usulan masyarakat yang terakomodir adalah usulan yang disampaikan pada kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan yang terakomodir pada daftar skala prioritas	(jumlah usulan yang terakomodir/jumlah seluruh usulan) x 100%	100	100	1.778.64 2.300,00	100	1.778.64 2.300,00	100	1.778.64 2.300,00	100	1.778.64 2.300,00	100	1.778.6 42.300, 00	100	8.893.2 11.500, 00	7.01.0.00. 0.00.02.0 001 - Kelurahan Pakunden	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02.000 1 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	12	12	22.299.9 00,00	12	22.299.9 00,00	12	22.299.9 00,00	12	22.299.9 00,00	12	22.299. 900,00	45	111.499 .500,00		
7.01.03.2.02.000 2 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan / pemeliharaan sarpras lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang di usulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	12	12	1.505.00 0.000,00	12	1.505.00 0.000,00	12	1.505.00 0.000,00	12	1.505.00 0.000,00	12	1.505.0 00.000, 00	60	7.525.0 00.000, 00		
7.01.03.2.02.000 3 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan pada seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	12	12	251.342. 400,00	12	251.342. 400,00	12	251.342. 400,00	12	251.342. 400,00	12	251.342 .400,00	60	1.256.7 12.000, 00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	100	100	94.760.9 00,00	100	94.760.9 00,00	100	94.760.9 00,00	100	94.760.9 00,00	100	94.760. 900,00	100	473.804 .500,00		
7.01.03.2.03.000 2 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya fasilitasi lembaga masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga masyarakat yang difasilitasi dengan anggaran pada Seksi Ekokesra	Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi pada tahun berjalan	5	5	84.996.7 00,00	5	84.996.7 00,00	5	84.996.7 00,00	5	84.996.7 00,00	5	84.996. 700,00	25	424.983 .500,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
7.01.03.2.03.000 4 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdaayaan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan pada seksi perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat pada tahun berjalan	3	3	9.764.20 0,00	3	9.764.20 0,00	3	9.764.20 0,00	3	9.764.20 0,00	3	9.764.2 00,00	15	48.821. 000,00		
KELURAHAN BLITAR																	0,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Layanan kedinasan sesuai standar adalah layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah kepada pengguna layanan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan	Jumlah fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku x Jumlah fasilitas layanan kedinasan yang diberikan	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	100	100	2.047.60 0,00	100	5.047.60 0,00	100	5.047.60 0,00	100	5.047.60 0,00	100	5.047.6 00,00	100	22.238. 000,00	7.01.0.00. 0.00.02.0 002 - Kelurahan Blitar	
7.01.01.2.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	3	3	1.023.80 0,00	3	1.023.80 0,00	3	1.023.80 0,00	3	1.023.80 0,00	3	1.023.8 00,00	15	5.119.0 00,00		
7.01.01.2.01.000 7 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran/tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	7	7	1.023.80 0,00	7	1.023.80 0,00	7	1.023.80 0,00	7	1.023.80 0,00	7	1.023.8 00,00	35	5.119.0 00,00		
7.01.01.2.01.000 9 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data statistik sektoral merupakan hasil pendataan statistik sektoral yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai SOP pengumpulan data statistik sektoral yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani statistik	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah pada tahun berjalan	3	0	0	3	1.000.00 0,00	3	1.000.00 0,00	3	1.000.00 0,00	3	1.000.0 00,00	15	4.000.0 00,00		
7.01.01.2.01.001 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selain Renstra dan Renja yaitu meliputi perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, standar pelayanan, rencana dan dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun tahun berjalan	11	11	0	11	2.000.00 0,00	11	2.000.00 0,00	11	2.000.00 0,00	11	2.000.0 00,00	55	8.000.0 00,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
			anggaran, dokumen pengarusutamaam gender, profil perangkat daerah																
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- - x 100 % Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	100	100	848.800,00	100	848.800,00	100	848.800,00	100	848.800,00	100	848.800,00	100	4.244.000,00		
7.01.01.2.02.000 7 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan keuangan memuat laporan keuangan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	4	4	848.800,00	4	848.800,00	4	848.800,00	4	848.800,00	4	848.800,00	20	4.244.000,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi barang milik daerah memuat pelayanan penatausahaan barang	Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah yang harus disediakan	100	100	0	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	4.000.000,00		
7.01.01.2.03.000 6 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah memuat Penyusunan RKPBM, Pengamanan, Penilaian, Pemanfaatan, Rekonsiliasi, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada tahun berjalan	10	0	0	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	50	4.000.000,00		
7.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah memuat laporan pengelolaan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah jenis administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ----- x 100% Jumlah jenis administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah yang harus disediakan	100	100	0	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	4.000.000,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan retribusi daerah memuat penyusunan pendataan, pemungutan, dan penyusunan laporan realisasi retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada tahun n	1	0	0	1	1.000.00 0,00	1	1.000.00 0,00	1	1.000.00 0,00	1	1.000.0 00,00	5	4.000.0 00,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhihinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	100	100	7.956.00 0,00	100	8.956.00 0,00	100	8.956.00 0,00	100	8.956.00 0,00	100	8.956.0 00,00	100	43.780. 000,00		
7.01.01.2.05.000 2 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/kostum untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	1	1	7.956.00 0,00	1	7.956.00 0,00	1	7.956.00 0,00	1	7.956.00 0,00	1	7.956.0 00,00	5	39.780. 000,00		
7.01.01.2.05.001 0 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	40	0	0	40	1.000.00 0,00	40	1.000.00 0,00	40	1.000.00 0,00	40	1.000.0 00,00	200	4.000.0 00,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhihinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	22.895.8 00,00	100	23.895.8 00,00	100	23.895.8 00,00	100	23.895.8 00,00	100	23.895. 800,00	100	118.479 .000,00		
7.01.01.2.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	1.820.00 0,00	1	1.820.00 0,00		1.820.00 0,00	1	1.820.00 0,00	1	1.820.0 00,00	5	9.100.0 00,00		
7.01.01.2.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	3	3	7.993.00 0,00	3	7.993.00 0,00	3	7.993.00 0,00	3	7.993.00 0,00	3	7.993.0 00,00	15	39.965. 000,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
7.01.01.2.06.000 3 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	3	3	2.763.90 0,00	3	2.763.90 0,00	3	2.763.90 0,00	3	2.763.90 0,00	3	2.763.9 00,00	15	13.819. 500,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	4	4	822.000, 00	4	822.000, 00	4	822.000, 00	4	822.000, 00	4	822.000 ,00	20	4.110.0 00,00		
7.01.01.2.06.000 5 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	5.829.60 0,00	1	5.829.60 0,00	1	5.829.60 0,00	1	5.829.60 0,00	1	5.829.6 00,00	5	29.148. 000,00		
7.01.01.2.06.000 6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	24	24	2.754.00 0,00	24	2.754.00 0,00	24	2.754.00 0,00	24	2.754.00 0,00	24	2.754.0 00,00	120	13.770. 000,00		
7.01.01.2.06.000 9 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mencakup perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	1	0	0	1	1.000.00 0,00	1	1.000.00 0,00	1	1.000.00 0,00	1	1.000.0 00,00	5	4.000.0 00,00		
7.01.01.2.06.001 0 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	1	1	913.300, 00	1	913.300, 00	1	913.300, 00	1	913.300, 00	1	913.300 ,00	5	4.566.5 00,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhiya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	100	100	0	100	2.000.00 0,00	100	2.000.00 0,00	100	2.000.00 0,00	100	2.000.0 00,00	100	8.000.0 00,00		
7.01.01.2.07.000 5 - Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	8	0	0	8	1.000.00 0,00	8	1.000.00 0,00	8	1.000.00 0,00	8	1.000.0 00,00	40	4.000.0 00,00		
7.01.01.2.07.000 6 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	2	0	0	2	1.000.00 0,00	2	1.000.00 0,00	2	1.000.00 0,00	2	1.000.0 00,00	10	4.000.0 00,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	100	100	18.257.280,00	100	19.257.280,00	100	19.257.280,00	100	19.257.280,00	100	19.257.280,00	100	95.286.400,00		
7.01.01.2.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	36	36	18.257.280,00	36	18.257.280,00	36	18.257.280,00	36	18.257.280,00	36	18.257.280,00	180	91.286.400,00		
7.01.01.2.08.000 3 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor memuat kegiatan persewaan peralatan dan perlengkapan yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	12	0	0	12	1.000.000,00		1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	60	4.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMDB	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	100	100	10.144.800,00	100	12.144.800,00	100	12.144.800,00	100	12.144.800,00	100	12.144.800,00	100	58.724.000,00		
7.01.01.2.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya adalah kendaraan jabatan yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMDB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada tahun berjalan	1	0	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	5	4.000.000,00		
7.01.01.2.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMDB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	5	5	4.394.800,00	5	4.394.800,00	5	4.394.800,00	5	4.394.800,00	5	4.394.800,00	25	21.974.000,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
7.01.01.2.09.000 5 - Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel yang dipelihara adalah mebel aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBM	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	10	0	0	10	1.000.00 0,00	10	1.000.00 0,00	10	1.000.00 0,00	10	1.000.0 00,00	50	4.000.0 00,00		
7.01.01.2.09.000 6 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	10	10	5.750.00 0,00	10	5.750.00 0,00	10	5.750.00 0,00	10	5.750.00 0,00	10	5.750.0 00,00	50	28.750. 000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraa n pemerintahan	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	Pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan adalah pelayanan kecamatan/kelurahan sesuai SPP dan SOP Pelayanan yang diselesaikan adalah pelayanan kependudukan dan fasilitas pelayanan umum, yang diselesaikan sesuai kewenangan kecamatan/kelurahan berdasarkan SP dan SOP. Pengaduan yang diselesaikan adalah pengaduan yang dilaporkan melalui front-office pelayanan kecamatan/kelurahan yang diselesaikan ditingkat kecamatan/kelurahan atau yang ditindaklanjuti dengan koordinasi pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan SOP Pengaduan	Rata-rata Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase pelayanan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengajuan pelayanan yang diselesaikan dibagi Jumlah pengajuan pelayanan dikali 100% Persentase pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengaduan	100	100		100		100		100		100		100		7.01.0.00. 0.00.02.0 002 - Kelurahan Blitar	
		Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum	Kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya adalah kelurahan yang memiliki poskampling yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat	(Jumlah Kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya / jumlah seluruh kelurahan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya	Kelurahan yang masyarakatnya tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum adalah masyarakat yang tertib membayar PBB-P2 dan Sewa Tanah aset berupa lahan pertanian	(Jumlah Kelurahan yang masyarakatnya tertib membayar PBB-P2 dan Sewa Tanah aset berupa lahan pertanian / jumlah seluruh kelurahan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraa n pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan adalah seluruh kegiatan pemerintahan umum (Administrasi Pertanahan, Persewaan tanah aset, Fasilitas Pemilu, Pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan, Fasilitas pembayaran PBB, dan Fasilitas Koordinasi Forkopimcam) yang dilakukan oleh Kecamatan dalam periode tertentu.	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan / Jumlah total rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan) x 100%	100	100	159.887. 800,00	100	147.887. 800,00	100	147.887. 800,00	100	147.887. 800,00	100	147.887 .800,00	100	751.439 .000,00	7.01.0.00. 0.00.02.0 002 - Kelurahan Blitar	

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Gangguan trantibum yang ditindaklanjuti adalah setiap kejadian yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat, baik yang bersifat sosial, lingkungan, maupun administratif, yang telah direspons atau ditangani oleh Kecamatan melalui tindakan preventif, persuasif, atau represif sesuai prosedur yang berlaku.	(Jumlah gangguan trantibum yang ditindaklanjuti / Jumlah seluruh gangguan trantibum) x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan	Cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan adalah luasan wilayah Kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum).	(Jumlah luasan wilayah kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) / Jumlah luasan wilayah di Kecamatan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01.000 1 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan masyarakat) dan Jumlah laporan hasil koordinasi penanganan pengaduan trantibum yang dilaksanakan	Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan masyarakat) dan Jumlah laporan hasil koordinasi penanganan pengaduan trantibum	4	4	8.855.80 0,00	4	8.855.80 0,00	4	8.855.80 0,00	4	8.855.80 0,00	4	8.855.800,00	20	44.279.000,00		
7.01.02.2.01.000 2 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan adalah Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah; Jumlah dokumen perjanjian sewa tanah aset berupa lahan pertanian yang terbit dalam tahun berkenaan dan Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pemilu di tahun berkenaan ; Jumlah laporan kegiatan pembinaan Wasbang yang difasilitasi ; Jumlah laporan pembayaran PBB; dan Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dengan forkopimcam pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah; Jumlah dokumen perjanjian sewa tanah aset berupa lahan pertanian yang terbit dalam tahun berkenaan dan Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pemilu di tahun berkenaan ; Jumlah laporan kegiatan pembinaan Wasbang yang difasilitasi ; Jumlah laporan pembayaran PBB; dan Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dengan forkopimcam pada tahun berkenaan	12	12	151.032.000,00	12	139.032.000,00	12	139.032.000,00	12	139.032.000,00	12	139.032.000,00	60	707.160.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan	Meningkatnya pemenuhan	Persentase kegiatan	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pelayanan	(Jumlah kegiatan pelayanan dan	100	100	24.310.400,00	100	24.310.400,00	100	24.310.400,00	100	24.310.400,00	100	24.310.400,00	100	121.552.000,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan	pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses dalam internal kecamatan/kelurahan dan yang disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai SOP dan SPP.	penganganan pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah kegiatan pelayanan dan pengananan pengaduan) x 100%															
		Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara	sarana dan prasaranan yang tersedia/terpelihara adalah fasilitas pelayanan yang disediakan dan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada untuk kelancaran dan kenyamanan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	(Jumlah sarpras yang disediakan atau dipelihara/jumlah sarpras standar pelayanan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.02.000 1 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan memuat dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat memuat SOP, SP, IKM, ISO	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan pada tahun berjalan	2	2	2.191.600,00	2	2.191.600,00	2	2.191.600,00	2	2.191.600,00	2	2.191.600,00	10	10.958.000,00		
7.01.02.2.02.000 3 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Sistem Informasi pelayanan yang terbangun/terpeliharaan adalah pembangunan atas sistem informasi yang belum terbangun dan pemeliharaan atas sistem informasi yang sudah ada yang digunakan guna menunjang kelancaran pelayanan secara online ; SDM pelayanan adalah personil yang terlibat dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat ; Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah laporan pelaksanaan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ada di kecamatan/kelurahan, termasuk kebutuhan SDM dan sarana prasarananya; sarana dan prasarana pelayanan adalah fasilitas yang disediakan di ruang pelayanan kelurahan dan kecamatan untuk kenyamanan masyarakat pencari layanan diantaranya adalah kursi tunggu, kursi roda bagi disabilitas, ruang laktasi, taman bermain anak, mamin tamu.	Jumlah sistem informasi yang ada atau akan di bangun; Jumlah SDM pelayanan yang ada; Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada tahun berjalan; DAN Jumlah sarpras pelayanan yang tersedia.	7	7	22.118.800,00	2	22.118.800,00	7	22.118.800,00	7	22.118.800,00	7	22.118.800,00	35	110.594.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Lembaga kemasyarakatan yang aktif adalah lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dan difasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta bidang perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	(jumlah lembaga yang aktif/jumlah lembaga kemasyarakatan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0002 - Kelurahan Blitar	

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
		Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM	Kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat yang secara kolektif dan berkelanjutan menjalankan usaha ekonomi nyata, yang dapat diobservasi melalui partisipasi anggota, proses produksi/jasa, dan orientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dan produktif pada tahun berjalan	100	100		100		100		100		100		100			
		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	Pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang mendukung pencapaian SPM adalah pemenuhan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras untuk 6 bidang pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum dan sosial sesuai Permendagri No. 100 tahun 2018	Jumlah bidang pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang dilaksanakan dibagi 6 dikalikan 100%	8	8		8		8		8		8		8			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	usulan masyarakat yang terakomodir adalah usulan yang disampaikan pada kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan yang terakomodir pada daftar skala prioritas	(jumlah usulan yang terakomodir/jumlah seluruh usulan) x 100%	100	100	894.191.800,00	100	894.191.800,00	100	894.191.800,00	100	894.191.800,00	100	894.191.800,00	100	4.470.959.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0002 - Kelurahan Blitar	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	100	100		100		100		100		100		100	0		
7.01.03.2.02.000 1 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	4	4	17.780.800,00	4	17.780.800,00	4	17.780.800,00	4	17.780.800,00	4	17.780.800,00	20	88.904.000,00		
7.01.03.2.02.000 2 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan / pemeliharaan sarpras lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang di usulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	4	4	785.000.000,00	4	785.000.000,00	4	785.000.000,00	4	785.000.000,00	4	785.000.000,00	20	3.925.000.000,00		
7.01.03.2.02.000 3 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan pada seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	4	4	91.411.000,00	4	91.411.000,00	4	91.411.000,00	4	91.411.000,00	4	91.411.000,00	20	457.055.000,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	100	100	139.525.300,00	100	139.525.300,00	100	139.525.300,00	100	139.525.300,00	100	139.525.300,00	100	697.626.500,00		
7.01.03.2.03.000 2 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya fasilitasi lembaga masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga masyarakat yang difasilitasi dengan anggaran pada Seksi Ekokesra	Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi pada tahun berjalan	4	4	129.005.300,00	4	129.005.300,00	4	129.005.300,00	4	129.005.300,00	4	129.005.300,00	20	645.026.500,00		
7.01.03.2.03.000 4 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdaayaan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan pada seksi perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat pada tahun berjalan	2	2	10.520.000,00	2	10.520.000,00	2	10.520.000,00	2	10.520.000,00	2	10.520.000,00	10	52.600.000,00		
KELURAHAN TLUMPU																			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Layanan kedinasan sesuai standar adalah layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah kepada pengguna layanan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan	Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku x 100% Jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang diberikan	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	100	100	1.184.386,00	100	2.719.917,00	100	2.756.515,00	100	2.794.211,00	100	2.833.037,00	100	12.288.066,00	7.01.0.00.0.00.02.0003 - Kelurahan Tlumpu	
7.01.01.2.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	3	3	648.678,00	3	668.138,00	3	688.182,00	3	708.828,00	3	730.093,00	20	3.443.919,00		
7.01.01.2.01.000 6 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2	2	535.708,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535.708,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan															
7.01.01.2.01.000 7 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran/tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	7	7	0	7	551.779,00	7	568.333,00	7	585.383,00	7	602.944,00	35	2.308.439,00		
7.01.01.2.01.000 9 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data statistik sektoral merupakan hasil pendataan statistik sektoral yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai SOP pengumpulan data statistik sektoral yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani statistik	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah pada tahun berjalan	1	1	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	5	2.000.000,00		
7.01.01.2.01.001 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selain Renstra dan Renja yaitu meliputi perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, standar pelayanan, rencana dan dokumen anggaran, dokumen pengarusutamaan gender, profil perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun tahun berjalan	11	11	0	11	1.000.000,00	11	1.000.000,00	11	1.000.000,00	11	1.000.000,00	55	4.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- - x 100 % Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	100	100	782.500,00	100	798.150,00	100	814.113,00	100	830.395,00	100	847.003,00	100	4.072.161,00		
7.01.01.2.02.000 7 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan keuangan memuat laporan keuangan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	1	1	782.500,00	1	798.150,00	1	814.113,00	1	830.395,00	1	847.003,00	5	4.072.161,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
	Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD																	
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi barang milik daerah memuat pelayanan penatausahaan barang	Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah yang harus disediakan	100	100	0	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	2.000.000,00		
7.01.01.2.03.000 6 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah memuat Penyusunan RKPBMĐ, Pengamanan, Penilaian, Pemanfaatan, Rekonsiliasi, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada tahun berjalan	1	1	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	5	2.000.000,00		
7.01.01.2.04 - Administrasi pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah memuat laporan pengelolaan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah jenis administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ----- x 100% Jumlah jenis administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah yang harus disediakan	100	100	0	100	500.000,00	100	515.000,00	100	530.450,00	100	546.364,00	100	2.091.814,00		
7.01.01.2.04.000 7 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan retribusi daerah memuat penyusunan pendataan, pemungutan, dan penyusunan laporan realisasi retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada tahun n	1	1	0	1	500.000,00	1	515.000,00	1	530.450,00	1	546.364,00	5	2.091.814,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	100	100	9.566.200,00	100	10.066.200,00	100	10.066.200,00	100	10.066.200,00	100	10.066.200,00	100	49.831.000,00		
7.01.01.2.05.000 2 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/kostum untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	1	1	9.566.200,00	1	9.566.200,00	1	9.566.200,00	1	9.566.200,00	1	9.566.200,00	5	47.831.000,00		
7.01.01.2.05.001 0 - Sosialisasi	Terlaksananya Sosialisasi	Jumlah Orang yang Mengikuti	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	40	40	0	40	500.000,00	40	500.000,00	40	500.000,00	40	500.000,00	200	2.000.000,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan															
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	34.317.298,00	100	35.025.025,00	100	35.516.264,00	100	36.022.239,00	100	36.543.395,00	100	177.424.221,00		
7.01.01.2.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	3.740.598,00	1	3.852.816,00	1	3.968.400,00	1	4.087.452,00	1	4.210.076,00	5	19.859.342,00		
7.01.01.2.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	8.650.400,00	1	8.650.400,00	1	8.650.400,00	1	8.650.400,00	1	8.650.400,00	5	43.252.000,00		
7.01.01.2.06.000 3 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	3	3	3.116.800,00	3	3.210.304,00	3	3.306.613,00	3	3.405.812,00	3	3.507.986,00	15	16.547.515,00		
7.01.01.2.06.000 4 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	5	50.000.000,00		
7.01.01.2.06.000 5 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	2	2	4.074.500,00	2	4.196.735,00	2	4.322.637,00	2	4.452.316,00	2	4.585.886,00	10	21.632.074,00		
7.01.01.2.06.000 6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	2	2	2.754.000,00	2	2.836.620,00	2	2.921.719,00	2	3.009.370,00	2	3.099.651,00	10	14.621.360,00		
7.01.01.2.06.001 0 - Penatausahaan	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	1	1	1.981.000,00	1	2.278.150,00	1	2.346.495,00	1	2.416.889,00	1	2.489.396,00	5	11.511.930,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
Arsip Dinamis pada SKPD		Arsip Dinamis pada SKPD	mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah																
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	100	100	36.251.600,00	100	31.492.692,00	100	30.933.892,00	100	30.358.489,00	100	29.765.985,00	100	158.802.658,00		
7.01.01.2.07.000 5 - Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	5.919.200,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	5	17.919.200,00		
7.01.01.2.07.000 6 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	30.332.400,00	1	28.492.692,00	1	27.933.892,00	1	27.358.489,00	1	26.765.985,00	5	140.883.458,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	100	100	14.821.200,00	100	14.821.200,00	100	14.821.200,00	100	14.821.200,00	100	14.821.200,00	100	74.106.000,00		
7.01.01.2.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	12	12	14.821.200,00	12	14.821.200,00	12	14.821.200,00	12	14.821.200,00	12	14.821.200,00	60	74.106.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPMD	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	100	100	27.503.800,00	100	28.503.800,00	100	28.503.800,00	100	28.503.800,00	100	28.503.800,00	100	141.519.000,00		
7.01.01.2.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya adalah kendaraan jabatan yang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	6	6	1.836.000,00	6	1.836.000,00	6	1.836.000,00	6	1.836.000,00	6	1.836.000,00	30	9.180.000,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMDB	dibayarkan Pajaknya pada tahun berjalan															
7.01.01.2.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMDB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	1	0	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	5	2.000.000,00		
7.01.01.2.09.000 5 - Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel yang dipelihara adalah mebel aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMDB	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	1	0	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	5	2.000.000,00		
7.01.01.2.09.000 6 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMDB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	3	3	16.259.800,00	3	16.259.800,00	3	16.259.800,00	3	16.259.800,00	3	16.259.800,00	15	81.299.000,00		
7.01.01.2.09.001 1 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMDB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	1	1	9.408.000,00	1	9.408.000,00	1	9.408.000,00	1	9.408.000,00	1	9.408.000,00	5	47.040.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	Pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan adalah pelayanan kecamatan/kelurahan sesuai SPP dan SOP Pelayanan yang diselesaikan adalah pelayanan kependudukan dan fasilitasi pelayanan umum, yang diselesaikan sesuai kewenangan kecamatan/kelurahan berdasarkan SP dan SOP. Pengaduan yang diselesaikan adalah pengaduan yang dilaporkan melalui front-office pelayanan kecamatan/kelurahan yang diselesaikan ditingkat	Rata-rata Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase pelayanan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengajuan pelayanan yang diselesaikan dibagi Jumlah pengajuan pelayanan dikali 100% Persentase pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengaduan	100	100		100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.003 - Kelurahan Tlumpu	

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
			kecamatan/kelurahan atau yang ditindaklanjuti dengan koordinasi pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan SOP Pengaduan																
		Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum	Kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya adalah kelurahan yang memiliki poskampling yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat	(Jumlah Kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya / jumlah seluruh kelurahan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya	Kelurahan yang masyarakatnya tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum adalah masyarakat yang tertib membayar PBB-P2 dan Sewa Tanah aset berupa lahan pertanian	(Jumlah Kelurahan yang masyarakatnya tertib membayar PBB-P2 dan Sewa Tanah aset berupa lahan pertanian / jumlah seluruh kelurahan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraa n pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan adalah seluruh kegiatan pemerintahan umum (Administrasi Pertanahan, Persewaan tanah aset, Fasilitas Pemilu, Pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan, Fasilitas pembayaran PBB, dan Fasilitas Koordinasi Forkopimcam) yang dilakukan oleh Kecamatan dalam periode tertentu.	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan / Jumlah total rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan) x 100%	100	100	142.832.000,00	100	142.832.000,00	100	142.832.000,00	100	142.832.000,00	100	142.832.000,00	100	714.160.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0003 - Kelurahan Tlumpu	
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Gangguan trantibum yang ditindaklanjuti adalah setiap kejadian yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat, baik yang bersifat sosial, lingkungan, maupun administratif, yang telah direspons atau ditangani oleh Kecamatan melalui tindakan preventif, persuasif, atau represif sesuai prosedur yang berlaku.	(Jumlah gangguan trantibum yang ditindaklanjuti / Jumlah seluruh gangguan trantibum) x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan	Cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan adalah luasan wilayah Kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum).	(Jumlah luasan wilayah kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) / Jumlah luasan wilayah di Kecamatan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi Perencanaan	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli	1	1	10.800.000,00	1	10.800.000,00	1	10.800.000,00	1	10.800.000,00	1	10.800.000,00	5	54.000.000,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terkait adalah Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat) dan Jumlah laporan hasil koordinasi penanganan pengaduan trantibum yang dilaksanakan	pengamanan kegiatan masyarakat) dan Jumlah laporan hasil koordinasi penanganan pengaduan trantibum															
7.01.02.2.01.000 2 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan adalah Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah; Jumlah dokumen perjanjian sewa tanah aset berupa lahan pertanian yang terbit dalam tahun berkenaan dan Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pemilu di tahun berkenaan ; Jumlah laporan kegiatan pembinaan Wasbang yang difasilitasi ; Jumlah laporan pembayaran PBB; dan Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dengan forkopimcam pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah; Jumlah dokumen perjanjian sewa tanah aset berupa lahan pertanian yang terbit dalam tahun berkenaan dan Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pemilu di tahun berkenaan ; Jumlah laporan kegiatan pembinaan Wasbang yang difasilitasi ; Jumlah laporan pembayaran PBB; dan Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dengan forkopimcam pada tahun berkenaan	1	1	132.032.000,00	1	132.032.000,00	1	132.032.000,00	1	132.032.000,00	1	132.032.000,00	5	660.160.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pelayanan kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses dalam internal kecamatan/kelurahan dan yang disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai SOP dan SPP.	(Jumlah kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan) x 100%	100	100	19.319.704,00	100	19.319.704,00	100	19.319.704,00	100	19.319.704,00	100	19.319.704,00	100	19.319.704,00		
		Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara	sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara adalah fasilitas pelayanan yang disediakan dan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada untuk kelancaran dan kenyamanan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	(Jumlah sarpras yang disediakan atau dipelihara/jumlah sarpras standar pelayanan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.02.000 1 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan memuat dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat memuat SOP, SP, IKM, ISO	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat pada tahun berjalan	1	1	1.719.704,00	1	1.719.704,00	1	1.719.704,00	1	1.719.704,00	1	1.719.704,00	5	1.719.704,00		
7.01.02.2.02.000 3 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Sistem Informasi pelayanan yang terbangun/terpeliharaan adalah pembangunan atas sistem informasi yang belum terbangun dan pemeliharaan atas sistem informasi	Jumlah sistem informasi yang ada atau akan dibangun; Jumlah SDM pelayanan yang ada; Jumlah Laporan	4	4	17.600.000,00	4	17.600.000,00	4	17.600.000,00	4	17.600.000,00	4	17.600.000,00	20	88.000.000,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	yang sudah ada yang digunakan guna menunjang kelancaran pelayanan secara online ; SDM pelayanan adalah personil yang terlibat dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat ; Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah laporan pelaksanaan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ada di kecamatan/kelurahan, termasuk kebutuhan SDM dan sarana prasarananya; sarana dan prasarana pelayanan adalah fasilitas yang disediakan di ruang pelayanan kelurahan dan kecamatan untuk kenyamanan masyarakat pencari layanan diantaranya adalah kursi tunggu, kursi roda bagi disabilitas, ruang laktasi, taman bermain anak, mamin tamu.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada tahun berjalan; DAN Jumlah sarpras pelayanan yang tersedia.															
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Lembaga kemasyarakatan yang aktif adalah lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dan difasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta bidang perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	(jumlah lembaga yang aktif/jumlah lembaga kemasyarakatan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0 003 - Kelurahan Tlumpu	
		Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM	Kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat yang secara kolektif dan berkelanjutan menjalankan usaha ekonomi nyata, yang dapat diobservasi melalui partisipasi anggota, proses produksi/jasa, dan orientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dan produktif pada tahun berjalan	100	100		100		100		100		100		100			
		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	Pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang mendukung pencapaian SPM adalah pemenuhan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras untuk 6 bidang pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum dan sosial sesuai Permendagri No. 100 tahun 2018	Jumlah bidang pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang dilaksanakan dibagi 6 dikalikan 100%	8	8		8		8		8		8		40			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	usulan masyarakat yang terakomodir adalah usulan yang disampaikan pada kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan yang terakomodir pada daftar skala prioritas	(jumlah usulan yang terakomodir/jumlah seluruh usulan) x 100%	100	100	879.356.233,00	100	879.356.233,00	100	879.356.233,00	100	879.356.233,00	100	879.356.233,00	100	4.396.781.165,00	7.01.0.00.0.00.02.0 003 - Kelurahan Tlumpu	

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
DAERAH KABUPATEN/KO TA	Perangkat Daerah	ketentuan yang berlaku	Standar Pelayanan yang telah ditetapkan	fasilitasi layanan kedinasan yang diberikan															
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	100	100	1.440.00 0,00	100	1.440.00 0,00	100	1.440.00 0,00	100	1.440.00 0,00	100	1.440.0 00,00	100	7.200.0 00,00	7.01.0.00. 0.00.02.0 004 - Kelurahan Turi	
7.01.01.2.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	3	3	720.000, 00	3	600.000, 00	3	600.000, 00	3	600.000, 00	3	600.000 ,00	20	3.120.0 00,00		
7.01.01.2.01.000 7 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran/tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	7	7	720.000, 00	7	400.000, 00	7	400.000, 00	7	400.000, 00	7	400.000 ,00	35	2.320.0 00,00		
7.01.01.2.01.000 9 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah .	Data statistik sektoral merupakan hasil pendataan statistik sektoral yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai SOP pengumpulan data statistik sektoral yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani statistik	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah pada tahun berjalan	1	1	0	1	200.000, 00	1	200.000, 00	1	200.000, 00	1	200.000 ,00	5	800.000 ,00		
7.01.01.2.01.001 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selain Renstra dan Renja yaitu meliputi perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, standar pelayanan, rencana dan dokumen anggaran, dokumen pengarusutamaam gender, profil perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun tahun berjalan	11	11	0	11	240.000, 00	11	240.000, 00	11	240.000, 00	11	240.000 ,00	55	960.000 ,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- - x 100 %	100	100	720.000, 00	100	720.000, 00	100	720.000, 00	100	720.000, 00	100	720.000 ,00	100	3.600.0 00,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
				Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani															
7.01.01.2.02.000 7 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan keuangan memuat laporan keuangan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	4	4	720.000,00	4	720.000,00	4	720.000,00	4	720.000,00	4	720.000,00	20	3.600.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/ SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	100	100	7.956.000,00	100	7.956.000,00	100	7.956.000,00	100	7.956.000,00	100	7.956.000,00	100	39.780.000,00		
7.01.01.2.05.000 2 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/ kostum untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	2	2	7.956.000,00	2	5.956.000,00	2	5.956.000,00	2	5.956.000,00	2	5.956.000,00	10	31.780.000,00		
7.01.01.2.05.001 0 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	40	0	-	40	2.000.000,00	40	2.000.000,00	40	2.000.000,00	40	2.000.000,00	200	#VALUE!		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/ SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	20.102.800,00	100	20.102.800,00	100	20.102.800,00	100	20.102.800,00	100	20.102.800,00	100	100.514.000,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
7.01.01.2.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	525.200,00	1	525.200,00	1	525.200,00	1	525.200,00	1	525.200,00	5	2.626.000,00		
7.01.01.2.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	5	5	6.518.700,00	5	6.518.700,00	5	6.518.700,00	5	6.518.700,00	5	6.518.700,00	25	32.593.500,00		
7.01.01.2.06.000 3 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	2	2	1.393.300,00	2	1.393.300,00	2	1.393.300,00	2	1.393.300,00	2	1.393.300,00	10	6.966.500,00		
7.01.01.2.06.000 4 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	2	1	5.995.600,00	1	5.995.600,00	1	5.995.600,00	1	5.995.600,00	1	5.995.600,00	5	29.978.000,00		
7.01.01.2.06.000 5 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	2	1	1.876.000,00	1	1.876.000,00	1	1.876.000,00	1	1.876.000,00	1	1.876.000,00	5	9.380.000,00		
7.01.01.2.06.000 6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	12	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	12	2.754.000,00	60	13.770.000,00		
7.01.01.2.06.001 0 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	2	2	1.040.000,00	2	1.040.000,00	2	1.040.000,00	2	1.040.000,00	2	1.040.000,00	10	5.200.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhiya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	100	100	5.770.700,00	100	5.770.700,00	100	5.770.700,00	100	5.770.700,00	100	5.770.700,00	100	28.853.500,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
7.01.01.2.07.000 5 - Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMd	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	2	0	0	2	2.000.00 0,00	2	2.000.00 0,00	2	2.000.00 0,00	2	2.000.0 00,00	10	8.000.0 00,00		
7.01.01.2.07.000 6 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMd	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	2	2	5.770.70 0,00	2	3.770.70 0,00	2	3.770.70 0,00	2	3.770.70 0,00	2	3.770.7 00,00	10	20.853. 500,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	100	100	18.120.3 30,00	100	18.120.3 30,00	100	18.120.3 30,00	100	18.120.3 30,00	100	18.120. 330,00	100	90.601. 650,00		
7.01.01.2.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	36	36	18.120.3 30,00	36	18.120.3 30,00	36	18.120.3 30,00	36	18.120.3 30,00	36	18.120. 330,00	180	90.601. 650,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	100	100	4.141.05 0,00	100	4.141.05 0,00	100	4.141.05 0,00	100	4.141.05 0,00	100	4.141.0 50,00	100	20.705. 250,00		
7.01.01.2.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya adalah kendaraan jabatan yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada tahun berjalan	1	0	0	1	775.650, 00	1	775.650, 00	1	775.650, 00	1	775.650 ,00	5	3.102.6 00,00		
7.01.01.2.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	5	5	1.775.65 0,00	5	1.000.00 0,00	5	1.000.00 0,00	5	1.000.00 0,00	5	1.000.0 00,00	25	5.775.6 50,00		

[illegible]

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
		trantibum secara swadaya	PBB-P2 dan Sewa Tanah aset berupa lahan pertanian	lahan pertanian / jumlah seluruh kelurahan) x 100%															
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraa n pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan adalah seluruh kegiatan pemerintahan umum (Administrasi Pertanahan, Persewaan tanah aset, Fasilitas Pemilu, Pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan, Fasilitas pembayaran PBB, dan Fasilitas Koordinasi Forkopimcam) yang dilakukan oleh Kecamatan dalam periode tertentu.	(Jumlah kegiatan penyelen ggaraan pemerintahan yan g telah dilaksanakan / Jumlah total rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan) x 100%	100	100	119.529.000,00	100	119.529.000,00	100	119.529.000,00	100	119.529.000,00	100	119.529.000,00	100	597.645.000,00	7.01.0.00.0.00.02.004 - Kelurahan Turi	
		Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Gangguan trantibum yang ditindaklanjuti adalah setiap kejadian yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat, baik yang bersifat sosial, lingkungan, maupun administratif, yang telah direspons atau ditangani oleh Kecamatan melalui tindakan preventif, persuasif, atau represif sesuai prosedur yang berlaku.	(Jumlah gangguan trantibum yang ditindaklanjuti / Jumlah seluruh gangguan trantibum) x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan	Cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan adalah luasan wilayah Kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum).	(Jumlah luasan wilayah kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) / Jumlah luasan wilayah di Kecamatan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01.000 1 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat) dan Jumlah laporan hasil koordinasi penanganan pengaduan trantibum yang dilaksanakan	Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat) dan Jumlah laporan hasil koordinasi penanganan pengaduan trantibum	14	14	8.179.200,00	14	8.179.200,00	14	8.179.200,00	14	8.179.200,00	14	8.179.200,00	70	40.896.000,00		
7.01.02.2.01.000 2 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan adalah Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah; Jumlah dokumen perjanjian sewa tanah aset berupa lahan pertanian yang terbit dalam tahun berkenaan dan Jumlah	Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah; Jumlah dokumen perjanjian sewa tanah aset berupa lahan pertanian yang terbit dalam tahun berkenaan dan Jumlah	14	14	111.349.800,00	14	111.349.800,00	14	111.349.800,00	14	111.349.800,00	14	111.349.800,00	70	556.749.000,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
		Tingkat Kecamatan	laporan fasilitasi kegiatan pemilu di tahun berkenaan ; Jumlah laporan kegiatan pembinaan Wasbang yang difasilitasi ; Jumlah laporan pembayaran PBB; dan Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dengan forkopimcam pada tahun berkenaan	laporan fasilitasi kegiatan pemilu di tahun berkenaan ; Jumlah laporan kegiatan pembinaan Wasbang yang difasilitasi ; Jumlah laporan pembayaran PBB; dan Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dengan forkopimcam pada tahun berkenaan															
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pelayanan kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses dalam internal kecamatan/kelurahan dan yang disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai SOP dan SPP.	(Jumlah kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan) x 100%	100	100	22.799.200,00	100	22.799.200,00	100	22.799.200,00	100	22.799.200,00	100	22.799.200,00	100	113.996.000,00		
		Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara	sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara adalah fasilitas pelayanan yang disediakan dan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada untuk kelancaran dan kenyamanan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	(Jumlah sarpras yang disediakan atau dipelihara/jumlah sarpras standar pelayanan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100	0		
7.01.02.2.02.000 1 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan memuat dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat memuat SOP, SP, IKM, ISO	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat pada tahun berjalan	14	14	1.300.000,00	14	1.300.000,00	14	1.300.000,00	14	1.300.000,00	14	1.300.000,00	70	6.500.000,00		
7.01.02.2.02.000 3 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Sistem Informasi pelayanan yang terbangun/terpeliharaan adalah pembangunan atas sistem informasi yang belum terbangun dan pemeliharaan atas sistem informasi yang sudah ada yang digunakan guna menunjang kelancaran pelayanan secara online ; SDM pelayanan adalah personil yang terlibat dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat ; Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah laporan pelaksanaan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ada di kecamatan/kelurahan, termasuk kebutuhan SDM dan sarana prasarananya; sarana dan prasarana pelayanan adalah fasilitas yang disediakan di ruang pelayanan kelurahan dan kecamatan untuk	Jumlah sistem informasi yang ada atau akan dibangun; Jumlah SDM pelayanan yang ada; Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada tahun berjalan; DAN Jumlah sarpras pelayanan yang tersedia.	14	14	21.499.200,00	14	21.499.200,00	14	21.499.200,00	14	21.499.200,00	14	21.499.200,00	70	107.496.000,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
			kenyamanan masyarakat pencari layanan diantaranya adalah kursi tunggu, kursi roda bagi disabilitas, ruang laktasi, taman bermain anak, mamin tamu.																
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Lembaga kemasyarakatan yang aktif adalah lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dan difasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta bidang perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	(jumlah lembaga yang aktif/jumlah lembaga kemasyarakatan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0004 - Kelurahan Turi	
		Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM	Kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat yang secara kolektif dan berkelanjutan menjalankan usaha ekonomi nyata, yang dapat diobservasi melalui partisipasi anggota, proses produksi/jasa, dan orientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dan produktif pada tahun berjalan	100	100		100		100		100		100		100			
		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	Pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang mendukung pencapaian SPM adalah pemenuhan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras untuk 6 bidang pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum dan sosial sesuai Permendagri No. 100 tahun 2018	Jumlah bidang pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang dilaksanakan dibagi 6 dikalikan 100%	8	8		8		8		8		8		40			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	usulan masyarakat yang terakomodir adalah usulan yang disampaikan pada kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan yang terakomodir pada daftar skala prioritas	(jumlah usulan yang terakomodir/jumlah seluruh usulan) x 100%	100	100	728.830.400,00	100	728.830.400,00	100	728.830.400,00	100	728.830.400,00	100	728.830.400,00	100	3.644.152.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0004 - Kelurahan Turi	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	7	7	21.210.300,00	7	21.210.300,00	7	21.210.300,00	7	21.210.300,00	7	21.210.300,00	35	106.051.500,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
7.01.03.2.02.000 2 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan / pemeliharaan sarpras lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang di usulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	7	7	105.000. 000,00	7	105.000. 000,00	7	105.000. 000,00	7	105.000. 000,00	7	105.000 .000,00	35	525.000 .000,00		
7.01.03.2.02.000 3 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan pada seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	7	7	602.620. 100,00	7	602.620. 100,00	7	602.620. 100,00	7	602.620. 100,00	7	602.620 .100,00	35	3.013.1 00.500, 00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	100	100	95.586.9 50,00	100	95.586.9 50,00	100	95.586.9 50,00	100	95.586.9 50,00	100	95.586. 950,00	100	477.934 .750,00		
7.01.03.2.03.000 2 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya fasilitasi lembaga masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga masyarakat yang difasilitasi dengan anggaran pada Seksi Ekokesra	Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi pada tahun berjalan	7	7	89.179.8 50,00	7	89.179.8 50,00	7	89.179.8 50,00	7	89.179.8 50,00	7	89.179. 850,00	35	445.899 .250,00		
7.01.03.2.03.000 4 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdaayaan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan pada seksi perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat pada tahun berjalan	7	7	6.407.10 0,00	7	6.407.10 0,00	7	6.407.10 0,00	7	6.407.10 0,00	7	6.407.1 00,00	35	32.035. 500,00		
KELURAHAN KARANGSARI																	0,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Layanan kedinasan sesuai standar adalah layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah kepada pengguna layanan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan	Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku ----- x 100% Jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang diberikan	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	100	100	2.921.20 0,00	100	3.923.20 0,00	100	3.923.20 0,00	100	3.923.20 0,00	100	3.923.2 00,00	100	18.614. 000,00	7.01.0.00. 0.00.02.0 005 - Kelurahan Karangsar i	
7.01.01.2.01.000 1 - Penyusunan	Tersusunnya Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	3	3	1.423.20 0,00	3	1.423.20 0,00	3	1.423.20 0,00	3	1.423.20 0,00	3	1.423.2 00,00	15	7.116.0 00,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah	perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Daerah yang tersusun pada tahun berjalan															
7.01.01.2.01.000 6 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan		2	2	1.498.00 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.498.0 00,00		
7.01.01.2.01.000 7 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran/tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	7	7	0	7	1.000.00 0,00	7	1.000.00 0,00	7	1.000.00 0,00	7	1.000.0 00,00	35	4.000.0 00,00		
7.01.01.2.01.000 9 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data statistik sektoral merupakan hasil pendataan statistik sektoral yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai SOP pengumpulan data statistik sektoral yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani statistik	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah pada tahun berjalan	1	1	0	1	500.000, 00	1	500.000, 00	1	500.000, 00	1	500.000 ,00	5	2.000.0 00,00		
7.01.01.2.01.001 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selain Renstra dan Renja yaitu meliputi perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, standar pelayanan, rencana dan dokumen anggaran, dokumen pengarusutamaan gender, profil perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun tahun berjalan	11	11	0	11	1.000.00 0,00	11	1.000.00 0,00	11	1.000.00 0,00	11	1.000.0 00,00	55	4.000.0 00,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- - x 100 % Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	100	100	1.348.40 0,00	100	1.348.40 0,00	100	1.348.40 0,00	100	1.348.40 0,00	100	1.348.4 00,00	100	6.742.0 00,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
7.01.01.2.02.000 7 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste ran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan memuat laporan keuangan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	9	9	1.348.40 0,00	9	1.348.40 0,00	9	1.348.40 0,00	9	1.348.40 0,00	9	1.348.4 00,00	45	6.742.0 00,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi barang milik daerah memuat pelayanan penatausahaan barang	Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah yang harus disediakan	100	100	0	100	500.000, 00	100	500.000, 00	100	500.000, 00	100	500.000 ,00	100	2.000.0 00,00		
7.01.01.2.03.000 6 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah memuat Penyusunan RKPBMd, Pengamanan, Penilaian, Pemanfaatan, Rekonsiliasi, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada tahun berjalan	9	9	0	9	500.000, 00	9	500.000, 00	9	500.000, 00	9	500.000 ,00	45	2.000.0 00,00		
7.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah memuat laporan pengelolaan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah jenis administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ----- x 100% Jumlah jenis administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah yang harus disediakan	100	100	0	100	500.000, 00	100	500.000, 00	100	500.000, 00	100	500.000 ,00	100	2.000.0 00,00		
7.01.01.2.04.000 7 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan retribusi daerah memuat penyusunan pendataan, pemungutan, dan penyusunan laporan realisasi retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada tahun n	14	14	0	14	500.000, 00	14	500.000, 00	14	500.000, 00	14	500.000 ,00	70	2.000.0 00,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% jumlah jenis	100	100	8.882.90 0,00	100	9.382.90 0,00	100	9.382.90 0,00	100	9.382.90 0,00	100	9.382.9 00,00	100	46.414. 500,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
				administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani															
7.01.01.2.05.000 2 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/kostum untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	1	1	8.882.90 0,00	1	8.882.90 0,00	1	8.882.90 0,00	1	8.882.90 0,00	1	8.882.9 00,00	5	44.414. 500,00		
7.01.01.2.05.001 0 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	40	0	0	40	500.000, 00	40	500.000, 00	40	500.000, 00	40	500.000 ,00	200	2.000.0 00,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	64.401.6 00,00	100	57.899.6 00,00	100	57.899.6 00,00	100	57.899.6 00,00	100	57.899. 600,00	100	296.000 .000,00		
7.01.01.2.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalansi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	2.521.50 0,00	1	2.521.50 0,00	1	2.521.50 0,00	1	2.521.50 0,00	1	2.521.5 00,00	5	12.607. 500,00		
7.01.01.2.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	5	5	14.618.9 00,00	5	14.618.9 00,00	5	14.618.9 00,00	5	14.618.9 00,00	5	14.618. 900,00	25	73.094. 500,00		
7.01.01.2.06.000 3 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	3	3	3.067.60 0,00	3	3.067.60 0,00	3	3.067.60 0,00	3	3.067.60 0,00	3	3.067.6 00,00	15	15.338. 000,00		
7.01.01.2.06.000 4 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	15	15	30.534.0 00,00	15	24.032.0 00,00	15	24.032.0 00,00	15	24.032.0 00,00	15	24.032. 000,00	15	126.662 .000,00		
7.01.01.2.06.000 5 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	8.671.50 0,00	1	8.671.50 0,00	1	8.671.50 0,00	1	8.671.50 0,00	1	8.671.5 00,00	5	43.357. 500,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
7.01.01.2.06.000 6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	12	12	3.978.00 0,00	12	3.978.00 0,00	12	3.978.00 0,00	12	3.978.00 0,00	12	3.978.0 00,00	60	19.890. 000,00		
7.01.01.2.06.001 0 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	1	1	1.010.10 0,00	1	1.010.10 0,00	1	1.010.10 0,00	1	1.010.10 0,00	1	1.010.1 00,00	5	5.050.5 00,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	100	100	0	100	400.000, 00	100	400.000, 00	100	400.000, 00	100	400.000 ,00	100	1.600.0 00,00		
7.01.01.2.07.000 5 - Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	3	3	0	3	200.000, 00	3	200.000, 00	3	200.000, 00	3	200.000 ,00	15	800.000 ,00		
7.01.01.2.07.000 6 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	2	2	0	2	200.000, 00	2	200.000, 00	2	200.000, 00	2	200.000 ,00	10	800.000 ,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	100	100	14.972.0 00,00	100	15.072.0 00,00	100	15.072.0 00,00	100	15.072.0 00,00	100	15.072. 000,00	100	75.260. 000,00		
7.01.01.2.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	24	24	14.972.0 00,00	24	14.972.0 00,00	24	14.972.0 00,00	24	14.972.0 00,00	24	14.972. 000,00	120	74.860. 000,00		
7.01.01.2.08.000 3 - Penyediaan	Tersedianya Jasa Peralatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor memuat kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan	1	1	0	1	100.000, 00	1	100.000, 00	1	100.000, 00	1	100.000 ,00	5	400.000 ,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	persewaan peralatan dan perlengkapan yang menunjang kegiatan perkantoran	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan															
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMDB	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	100	100	15.992.900,00	100	17.992.900,00	100	17.992.900,00	100	17.992.900,00	100	17.992.900,00	100	87.964.500,00		
7.01.01.2.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya adalah kendaraan jabatan yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMDB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada tahun berjalan	1	1	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	5	4.000.000,00		
7.01.01.2.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMDB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	6	6	6.149.700,00	6	6.149.700,00	6	6.149.700,00	6	6.149.700,00	6	6.149.700,00	30	30.748.500,00		
7.01.01.2.09.000 5 - Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel yang dipelihara adalah mebel aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMDB	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	0	1	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	5	2.000.000,00		
7.01.01.2.09.000 6 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMDB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	18	18	9.843.200,00	18	9.843.200,00	18	9.843.200,00	18	9.843.200,00	18	9.843.200,00	90	49.216.000,00		
7.01.01.2.09.001 1 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMDB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	1	1	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	60	2.000.000,00		

[illegible]

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
			persuasif, atau represif sesuai prosedur yang berlaku.																
		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan	Cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan adalah luasan wilayah Kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum).	(Jumlah luasan wilayah kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) / Jumlah luasan wilayah di Kecamatan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.01.000 1 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat) dan Jumlah laporan hasil koordinasi penanganan pengaduan trantibum yang dilaksanakan	Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat) dan Jumlah laporan hasil koordinasi penanganan pengaduan trantibum	2	2	13.950.000,00	2	13.950.000,00	2	13.950.000,00	2	13.950.000,00	2	13.950.000,00	10	69.750.000,00		
7.01.02.2.01.000 2 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan adalah Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah; Jumlah dokumen perjanjian sewa tanah aset berupa lahan pertanian yang terbit dalam tahun berkenaan dan Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pemilu di tahun berkenaan ; Jumlah laporan kegiatan pembinaan Wasbang yang difasilitasi ; Jumlah laporan pembayaran PBB; dan Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dengan forkopimcam pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah; Jumlah dokumen perjanjian sewa tanah aset berupa lahan pertanian yang terbit dalam tahun berkenaan dan Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pemilu di tahun berkenaan ; Jumlah laporan kegiatan pembinaan Wasbang yang difasilitasi ; Jumlah laporan pembayaran PBB; dan Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dengan forkopimcam pada tahun berkenaan	1	1	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	5	4.000.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pelayanan kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses dalam internal kecamatan/kelurahan dan yang disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai SOP dan SPP.	(Jumlah kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan) x 100%	100	100	23.600.000,00	100	23.600.000,00	100	23.600.000,00	100	23.600.000,00	100	23.600.000,00	100	118.000.000,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
		mendukung pencapaian SPM	peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.																
		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	Pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang mendukung pencapaian SPM adalah pemenuhan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras untuk 6 bidang pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum dan sosial sesuai Permendagri No. 100 tahun 2018	Jumlah bidang pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang dilaksanakan dibagi 6 dikalikan 100%	8	8		8		8		8		8		40			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	usulan masyarakat yang terakomodir adalah usulan yang disampaikan pada kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan yang terakomodir pada daftar skala prioritas	(jumlah usulan yang terakomodir/jumlah seluruh usulan) x 100%	100	100	1.179.84 2.200,00	100	1.179.84 2.200,00	100	1.179.84 2.200,00	100	1.179.84 2.200,00	100	1.179.8 42.200, 00	100	5.899.2 11.000, 00	7.01.0.00. 0.00.02.0 005 - Kelurahan Karangsar i	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02.000 1 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	17	17	20.810.4 00,00	17	20.810.4 00,00	17	20.810.4 00,00	17	20.810.4 00,00	17	20.810. 400,00	60	104.052 .000,00		
7.01.03.2.02.000 2 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan / pemeliharaan sarpras lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang di usulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	6	6	890.000. 000,00	6	890.000. 000,00	6	890.000. 000,00	6	890.000. 000,00	6	890.000 .000,00	30	4.450.0 00.000, 00		
7.01.03.2.02.000 3 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan pada seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	6	6	269.031. 800,00	6	269.031. 800,00	6	269.031. 800,00	6	269.031. 800,00	6	269.031 .800,00	30	1.345.1 59.000, 00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat	100	100	102.917. 900,00	100	102.917. 900,00	100	102.917. 900,00	100	102.917. 900,00	100	102.917 .900,00	100	514.589 .500,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
				yang seharusnya dilaksanakan)x 100%															
7.01.03.2.03.000 2 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya fasilitasi lembaga masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga masyarakat yang difasilitasi dengan anggaran pada Seksi Ekokesra	Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi pada tahun berjalan	4	4	93.361.300,00	4	93.361.300,00	4	93.361.300,00	4	93.361.300,00	4	93.361.300,00	20	466.806.500,00		
7.01.03.2.03.000 4 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdaayaa n kesejahteraan masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan pemberdayaan masyarakat adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan pada seksi perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat pada tahun berjalan	2	2	9.556.600,00	2	9.556.600,00	2	9.556.600,00	2	9.556.600,00	2	9.556.600,00	10	47.783.000,00		
KELURAHAN SUKOREJO																			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Layanan kedinasan sesuai standar adalah layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah kepada pengguna layanan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan	Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku ----- x 100% Jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang diberikan	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	100	100	540.000,00	100	2.427.200,00	100	2.441.200,00	100	2.455.200,00	100	2.469.200,00	100	10.332.800,00	7.01.0.00.0.00.02.006 - Kelurahan Sukorejo	
7.01.01.2.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	3	3	540.000,00	3	1.423.200,00	3	1.423.200,00	3	1.423.200,00	3	1.423.200,00	60	6.232.800,00		
7.01.01.2.01.000 7 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran/tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	7	7	0	7	500.000,00	7	500.000,00	7	500.000,00	7	500.000,00	35	2.000.000,00		
7.01.01.2.01.000 9 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data statistik sektoral merupakan hasil pendataan statistik sektoral yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai SOP pengumpulan data statistik sektoral yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani statistik	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah pada tahun berjalan	1	1	0	1	252.000,00	1	259.000,00	1	266.000,00	1	273.000,00	5	1.050.000,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
7.01.01.2.01.001 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selain Renstra dan Renja yaitu meliputi perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, standar pelayanan, rencana dan dokumen anggaran, dokumen pengarusutamaam gender, profil perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun tahun berjalan	11	11	0	11	252.000,00	11	259.000,00	11	266.000,00	11	273.000,00	55	1.050.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- - x 100 % Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	100	100	1.000.000,00	100	1.348.400,00	100	1.348.400,00	100	1.348.400,00	100	1.348.400,00	100	6.393.600,00		
7.01.01.2.02.000 7 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			4	4	1.000.000,00	4	1.348.400,00	4	1.348.400,00	4	1.348.400,00	4	1.348.400,00	20	6.393.600,00		
7.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah memuat laporan pengelolaan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah jenis administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ----- x 100% Jumlah jenis administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah yang harus disediakan	100	100	0	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	2.000.000,00		
7.01.01.2.04.000 7 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan retribusi daerah memuat penyusunan pendataan, pemungutan, dan penyusunan laporan realisasi retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada tahun n	4	0	0	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	20	2.000.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar	100	100	9.573.000,00	100	9.382.900,00	100	9.382.900,00	100	9.382.900,00	100	9.382.900,00	100	47.104.600,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
Perangkat Daerah	perangkat daerah	perangkat daerah yang sesuai standar	perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	----- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani															
7.01.01.2.05.000 2 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/kostum untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	1	1	9.573.00 0,00	1	8.882.90 0,00	1	8.882.90 0,00	1	8.882.90 0,00	1	8.882.9 00,00	5	45.104. 600,00		
7.01.01.2.05.001 0 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	40	0	0	40	500.000, 00	40	500.000, 00	40	500.000, 00	40	500.000 ,00	200	2.000.0 00,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	30.886.4 00,00	100	31.386.4 00,00	100	31.386.4 00,00	100	31.386.4 00,00	100	31.386. 400,00	100	156.432 .000,00		
7.01.01.2.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	1.456.00 0,00	1	1.456.00 0,00	1	1.456.00 0,00	1	1.456.00 0,00	1	1.456.0 00,00	5	7.280.0 00,00		
7.01.01.2.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	10.278.0 00,00	1	10.278.0 00,00	1	10.278.0 00,00	1	10.278.0 00,00	1	10.278. 000,00	5	51.390. 000,00		
7.01.01.2.06.000 3 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	1	0	0	1	500.000, 00	1	500.000, 00	1	500.000, 00	1	500.000 ,00	5	2.000.0 00,00		
7.01.01.2.06.000 4 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	13.100.0 00,00	1	13.100.0 00,00	1	13.100.0 00,00	1	13.100.0 00,00	1	13.100. 000,00	5	65.500. 000,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
7.01.01.2.06.000 5 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	2.596.40 0,00	1	2.596.40 0,00	1	2.596.40 0,00	1	2.596.40 0,00	1	2.596.4 00,00	5	12.982. 000,00		
7.01.01.2.06.000 6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	1.956.00 0,00	1	1.956.00 0,00	1	1.956.00 0,00	1	1.956.00 0,00	1	1.956.0 00,00	5	9.780.0 00,00		
7.01.01.2.06.001 0 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	1	1	1.500.00 0,00	1	1.500.00 0,00	1	1.500.00 0,00	1	1.500.00 0,00	1	1.500.0 00,00	5	7.500.0 00,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan	100	100	0	100	1.500.00 0,00	100	1.500.00 0,00	100	1.500.00 0,00	100	1.500.0 00,00	100	6.000.0 00,00		
7.01.01.2.07.000 5 - Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	1	0	0	1	500.000, 00	1	500.000, 00	1	500.000, 00	1	500.000 ,00	5	2.000.0 00,00		
7.01.01.2.07.000 6 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	4	0	0	4	1.000.00 0,00	4	1.000.00 0,00	4	1.000.00 0,00	4	1.000.0 00,00	20	4.000.0 00,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	100	100	15.272.4 00,00	100	12.982.0 00,00	100	12.989.0 00,00	100	12.996.0 00,00	100	13.003. 000,00	100	67.242. 400,00		
7.01.01.2.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi,	Tersedianya Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	3	3	15.272.4 00,00	3	10.852.0 00,00	3	10.859.0 00,00	3	10.866.0 00,00	3	10.873. 000,00	15	58.722. 400,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan															
7.01.01.2.08.000 3 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor memuat kegiatan persewaan peralatan dan perlengkapan yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	0	0	1	2.130.00 0,00	1	2.130.00 0,00	1	2.130.00 0,00	1	2.130.0 00,00	5	8.520.0 00,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMDB	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	100	100	35.148.7 01,00	100	22.393.6 01,00	100	22.372.6 01,00	100	22.351.6 01,00	100	22.330. 601,00	100	124.597 .105,00		
7.01.01.2.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya adalah kendaraan jabatan yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMDB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada tahun berjalan	6	0	2.130.00 0,00	6	1.000.00 0,00	6	1.000.00 0,00	6	1.000.00 0,00	6	1.000.0 00,00	30	6.130.0 00,00		
7.01.01.2.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMDB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	1	1	2.040.00 0,00	1	2.040.00 0,00	1	2.040.00 0,00	1	2.040.00 0,00	1	2.040.0 00,00	5	10.200. 000,00		
7.01.01.2.09.000 5 - Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel yang dipelihara adalah mebel aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMDB	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	2	0	0	2	5.000.00 0,00	2	5.000.00 0,00	2	5.000.00 0,00	2	5.000.0 00,00	10	20.000. 000,00		
7.01.01.2.09.000 6 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMDB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	10	10	6.118.10 0,00	10	6.118.10 0,00	10	6.118.10 0,00	10	6.118.10 0,00	10	6.118.1 00,00	50	30.590. 500,00		
7.01.01.2.09.001 1 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman,	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	1	24.860.6 01,00	1	8.235.50 1,00	1	8.214.50 1,00	1	8.193.50 1,00	1	8.172.5 01,00	5	57.676. 605,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
			yang bersifat sosial, lingkungan, maupun administratif, yang telah direspons atau ditangani oleh Kecamatan melalui tindakan preventif, persuasif, atau represif sesuai prosedur yang berlaku.	seluruh gangguan trantibum) x 100%															
		Persentase cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan	Cakupan pengamanan wilayah yang dilaksanakan adalah luasan wilayah Kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum).	(Jumlah luasan wilayah kecamatan yang telah mendapatkan kegiatan pengamanan secara aktif oleh Kecamatan dalam periode waktu tertentu, baik secara mandiri maupun terpadu, guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) / Jumlah luasan wilayah di Kecamatan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100	0		
7.01.02.2.01.000 1 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat) dan Jumlah laporan hasil koordinasi penanganan pengaduan trantibum yang dilaksanakan	Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat) dan Jumlah laporan hasil koordinasi penanganan pengaduan trantibum	14	14	10.000.000,00	14	21.000.000,00	14	21.000.000,00	14	21.000.000,00	14	21.000.000,00	70	94.000.000,00		
7.01.02.2.01.000 2 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan adalah Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah; Jumlah dokumen perjanjian sewa tanah aset berupa lahan pertanian yang terbit dalam tahun berkenaan dan Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pemilu di tahun berkenaan ; Jumlah laporan kegiatan pembinaan Wasbang yang difasilitasi ; Jumlah laporan pembayaran PBB; dan Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dengan forkopimcam pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah; Jumlah dokumen perjanjian sewa tanah aset berupa lahan pertanian yang terbit dalam tahun berkenaan dan Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pemilu di tahun berkenaan ; Jumlah laporan kegiatan pembinaan Wasbang yang difasilitasi ; Jumlah laporan pembayaran PBB; dan Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dengan forkopimcam pada tahun berkenaan	14	14	428.806.800,00	14	428.806.800,00	14	428.806.800,00	14	428.806.800,00	14	428.806.800,00	70	2.144.034.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai	Persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pelayanan kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses dalam internal kecamatan/kelurahan dan	(Jumlah kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah kegiatan pelayanan dan	100	100	78.600.000,00	100	78.600.000,00	100	78.600.000,00	100	78.600.000,00	100	78.600.000,00	100	393.000.000,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
		masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM	yang dapat diobservasi melalui partisipasi anggota, proses produksi/jasa, dan orientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.																
		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif	Pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang mendukung pencapaian SPM adalah pemenuhan pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras untuk 6 bidang pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum dan sosial sesuai Permendagri No. 100 tahun 2018	Jumlah bidang pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat dan atau sarpras kelurahan yang dilaksanakan dibagi 6 dikalikan 100%	8	8		8		8		8		8		40			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	usulan masyarakat yang terakomodir adalah usulan yang disampaikan pada kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan yang terakomodir pada daftar skala prioritas	(jumlah usulan yang terakomodir/jumlah seluruh usulan) x 100%	100	100	2.642.18 2.400,00	100	2.642.18 2.400,00	100	2.642.18 2.400,00	100	2.642.18 2.400,00	100	2.642.1 82.400, 00	100	13.210. 912.000 ,00	7.01.0.00. 0.00.02.0 006 - Kelurahan Sukorejo	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02.000 1 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	9	9	39.900.0 00,00	9	39.900.0 00,00	9	39.900.0 00,00	9	39.900.0 00,00	9	39.900. 000,00	45	199.500 .000,00		
7.01.03.2.02.000 2 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan / pemeliharaan sarpras lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang di usulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	51	51	1.850.00 0.000,00	51	1.850.00 0.000,00	51	1.850.00 0.000,00	51	1.850.00 0.000,00	51	1.850.0 00.000, 00	255	9.250.0 00.000, 00		
7.01.03.2.02.000 3 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan pada seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	15	8	752.282. 400,00	8	752.282. 400,00	8	752.282. 400,00	8	752.282. 400,00	8	752.282 .400,00	40	3.761.4 12.000, 00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian dan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan /Kegiatan	100	100	83.899.3 00,00	100	83.899.3 00,00	100	83.899.3 00,00	100	83.899.3 00,00	100	83.899. 300,00	100	419.496 .500,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
Tingkat Kecamatan	kesejahteraan masyarakat	kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan		pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%															
7.01.03.2.03.000 2 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya fasilitasi lembaga masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga masyarakat yang difasilitasi dengan anggaran pada Seksi Ekokesra	Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi pada tahun berjalan	8	8	73.048.900,00	8	73.048.900,00	8	73.048.900,00	8	73.048.900,00	8	73.048.900,00	40	365.244.500,00		
7.01.03.2.03.000 4 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdaayaan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan pada seksi perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat pada tahun berjalan	2	2	10.850.400,00	2	10.850.400,00	2	10.850.400,00	2	10.850.400,00	2	10.850.400,00	10	54.252.000,00		
KELURAHAN TANJUNGSARI																			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Layanan kedinasan sesuai standar adalah layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah kepada pengguna layanan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan	Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku ----- x Jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang diberikan	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ----- x Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	100	100	2.950.000,00	100	7.950.000,00	100	7.950.000,00	100	7.950.000,00	100	7.950.000,00	100	34.750.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0007 - Kelurahan Tanjungsari	
7.01.01.2.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	3	3	1.350.000,00	3	1.350.000,00	3	1.350.000,00	3	1.350.000,00	3	1.350.000,00	255	6.750.000,00		
7.01.01.2.01.000 6 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan	2	2	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
7.01.01.2.01.000 7 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran/tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	7	7	0	7	2.600.00 0,00	7	2.600.00 0,00	7	2.600.00 0,00	7	2.600.00 0,00	35	10.400.000,00		
7.01.01.2.01.000 9 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data statistik sektoral merupakan hasil pendataan statistik sektoral yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai SOP pengumpulan data statistik sektoral yang dikordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani statistik	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah pada tahun berjalan	1	1	0	1	1.000.00 0,00	1	1.000.00 0,00	1	1.000.00 0,00	1	1.000.00 0,00	5	4.000.00 0,00		
7.01.01.2.01.001 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selain Renstra dan Renja yaitu meliputi perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, standar pelayanan, rencana dan dokumen anggaran, dokumen pengarusutamaam gender, profil perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun tahun berjalan	11	11	0	11	3.000.00 0,00	11	3.000.00 0,00	11	3.000.00 0,00	11	3.000.00 0,00	55	12.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- - x 100 % Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	100	100	840.000,00	100	840.000,00	100	840.000,00	100	840.000,00	100	840.000,00	100	4.200.00 0,00		
7.01.01.2.02.000 7 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan keuangan memuat laporan keuangan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	9	9	840.000,00	9	840.000,00	9	840.000,00	9	840.000,00	9	840.000,00	45	4.200.00 0,00		
				Jumlah jenis administrasi	100	100	0	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi barang milik daerah memuat pelayanan penatausahaan barang	Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah yang harus disediakan					1.000.00 0,00		1.000.00 0,00		1.000.00 0,00		1.000.0 00,00		4.000.0 00,00		
7.01.01.2.03.000 6 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah memuat Penyusunan RKPBM, Pengamanan, Penilaian, Pemanfaatan, Rekonsiliasi, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada tahun berjalan	9	9	0	9	1.000.00 0,00	9	1.000.00 0,00	9	1.000.00 0,00	9	1.000.0 00,00	45	4.000.0 00,00		
7.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi Pendapatan Daerah memuat laporan pengelolaan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah jenis administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ----- x 100% Jumlah jenis administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah yang harus disediakan	100	100	0	100	1.000.00 0,00	100	1.000.00 0,00	100	1.000.00 0,00	100	1.000.0 00,00	100	4.000.0 00,00		
7.01.01.2.04.000 7 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan retribusi daerah memuat penyusunan pendataan, pemungutan, dan penyusunan laporan realisasi retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada tahun n	14	14	0	14	1.000.00 0,00	14	1.000.00 0,00	14	1.000.00 0,00	14	1.000.0 00,00	70	4.000.0 00,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	100	100	6.120.00 0,00	100	7.120.00 0,00	100	7.120.00 0,00	100	7.120.00 0,00	100	7.120.0 00,00	100	34.600. 000,00		
7.01.01.2.05.000 2 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/kostum untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	3	3	6.120.00 0,00	3	6.120.00 0,00	3	6.120.00 0,00	3	6.120.00 0,00	3	6.120.0 00,00	15	30.600. 000,00		
7.01.01.2.05.001 0 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	40	0	0	40	1.000.00 0,00	40	1.000.00 0,00	40	1.000.00 0,00	40	1.000.0 00,00	200	4.000.0 00,00		

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan	100	100	23.020.200,00	100	23.020.200,00	100	23.020.200,00	100	23.020.200,00	100	23.020.200,00	100	115.101.000,00		
7.01.01.2.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	2.184.000,00	1	2.184.000,00	1	2.184.000,00	1	2.184.000,00	1	2.184.000,00	5	10.920.000,00		
7.01.01.2.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	4	4	5.038.000,00	4	5.038.000,00	4	5.038.000,00	4	5.038.000,00	4	5.038.000,00	20	25.190.000,00		
7.01.01.2.06.000 3 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	3	3	1.388.000,00	3	1.388.000,00	3	1.388.000,00	3	1.388.000,00	3	1.388.000,00	15	6.940.000,00		
7.01.01.2.06.000 4 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	2	2	6.715.000,00	2	6.715.000,00	2	6.715.000,00	2	6.715.000,00	2	6.715.000,00	10	33.575.000,00		
7.01.01.2.06.000 5 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetak dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	2	2	3.979.000,00	2	3.979.000,00	2	3.979.000,00	2	3.979.000,00	2	3.979.000,00	10	19.895.000,00		
7.01.01.2.06.000 6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	24	24	2.754.000,00	24	2.754.000,00	24	2.754.000,00	24	2.754.000,00	24	2.754.000,00	120	13.770.000,00		
7.01.01.2.06.001 0 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	1	1	962.200,00	1	962.200,00	1	962.200,00	1	962.200,00	1	962.200,00	5	4.811.000,00		
				Jumlah BMD penunjang	100	100		100		100		100		100					

BIDANG URUSAN / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	urusan yang tersedia sesuai kebutuhan ----- x 100 % Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan			2.506.20 0,00		3.506.20 0,00		3.506.20 0,00		3.506.20 0,00		3.506.2 00,00		16.531. 000,00		
7.01.01.2.07.000 5 - Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel yang Disediakan mencakup mebel yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	3	3	-	3	1.000.00 0,00	3	1.000.00 0,00	3	1.000.00 0,00	3	1.000.0 00,00	15	#VALUE !		
7.01.01.2.07.000 6 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	2	2	2.506.20 0,00	2	2.506.20 0,00	2	2.506.20 0,00	2	2.506.20 0,00	2	2.506.2 00,00	10	12.531. 000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	100	100	13.999.5 00,00	100	1.999.50 0,00	100	1.999.50 0,00	100	1.999.50 0,00	100	1.999.5 00,00	100	21.997. 500,00		
7.01.01.2.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	12	12	13.999.5 00,00	12	999.500, 00	12	999.500, 00	12	999.500, 00	12	999.500 ,00	60	17.997. 500,00		
7.01.01.2.08.000 3 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor memuat kegiatan persewaan peralatan dan perlengkapan yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	0	1	1.000.00 0,00	1	1.000.00 0,00	1	1.000.00 0,00	1	1.000.0 00,00	5	4.000.0 00,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMd	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	100	100	11.598.8 00,00	100	14.598.8 00,00	100	14.598.8 00,00	100	14.598.8 00,00	100	14.598. 800,00	100	69.994. 000,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
7.01.01.2.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya adalah kendaraan jabatan yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMĐ	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada tahun berjalan	1	1	0	1	1.000.00 0,00	1	1.000.00 0,00	1	1.000.00 0,00	1	1.000.0 00,00	5	4.000.0 00,00		
7.01.01.2.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMĐ	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	9	9	3.159.00 0,00	9	3.159.00 0,00	9	3.159.00 0,00	9	3.159.00 0,00	9	3.159.0 00,00	45	15.795. 000,00		
7.01.01.2.09.000 5 - Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel yang dipelihara adalah mebel aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	0	1	0	1	1.000.00 0,00	1	1.000.00 0,00	1	1.000.00 0,00	1	1.000.0 00,00	5	4.000.0 00,00		
7.01.01.2.09.000 6 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	10	10	8.439.80 0,00	10	8.439.80 0,00	10	8.439.80 0,00	10	8.439.80 0,00	10	8.439.8 00,00	50	42.199. 000,00		
7.01.01.2.09.001 1 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMĐ	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	9	9	0	9	1.000.00 0,00	9	1.000.00 0,00	9	1.000.00 0,00	9	1.000.0 00,00	45	4.000.0 00,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraa n pemerintahan	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan	Pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan adalah pelayanan kecamatan/kelurahan sesuai SPP dan SOP Pelayanan yang diselesaikan adalah pelayanan kependudukan dan fasilitas pelayanan umum, yang diselesaikan sesuai kewenangan kecamatan/kelurahan berdasarkan SP dan SOP.	Rata-rata Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan Persentase pelayanan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan = Jumlah pengajuan pelayanan yang diselesaikan dibagi Jumlah pengajuan pelayanan dikali 100%	100	100		100		100		100		100		100		7.01.0.00. 0.00.02.0 007 - Kelurahan Tanjungsa ri	

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
				luas wilayah di Kecamatan) x 100%															
7.01.02.2.01.000 1 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait adalah Jumlah laporan pengamanan wilayah (Patroli rutin, patroli gabungan, patroli pengamanan kegiatan masyarakat) dan Jumlah laporan hasil koordinasi penanganan pengaduan transtibum		1	1	5.000.00 0,00	1	5.000.00 0,00	1	5.000.00 0,00	1	5.000.00 0,00	1	5.000.0 00,00	5	25.000. 000,00		
7.01.02.2.01.000 2 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan adalah Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah; Jumlah dokumen perjanjian sewa tanah aset berupa lahan pertanian yang terbit dalam tahun berkenaan dan Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pemilu di tahun berkenaan ; Jumlah laporan kegiatan pembinaan Wasbang yang difasilitasi ; Jumlah laporan pembayaran PBB; dan Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dengan forkopimcam pada tahun berkenaan	Jumlah Dokumen Waris, APHB, Hibah, dan AJB Tanah; Jumlah dokumen perjanjian sewa tanah aset berupa lahan pertanian yang terbit dalam tahun berkenaan dan Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pemilu di tahun berkenaan ; Jumlah laporan kegiatan pembinaan Wasbang yang difasilitasi ; Jumlah laporan pembayaran PBB; dan Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dengan forkopimcam pada tahun berkenaan	2	2	308.878. 400,00	2	308.878. 400,00	2	308.878. 400,00	2	308.878. 400,00	2	308.878 .400,00	10	1.544.3 92.000, 00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang sesuai standard di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pelayanan dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pelayanan kepada masyarakat dan penanganan pengaduan yang diproses dalam internal kecamatan/kelurahan dan yang disampaikan kepada perangkat daerah terkait sesuai SOP dan SPP.	(Jumlah kegiatan pelayanan dan pengananan pengaduan yang ditindaklanjuti/jumlah kegiatan pelayanan dan pengananan pengaduan) x 100%	100	100	41.994.6 00,00	100	41.994.6 00,00	100	41.994.6 00,00	100	41.994.6 00,00	100	41.994. 600,00	100	209.973 .000,00		
		Persentase sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara	sarana dan prasarana yang tersedia/terpelihara adalah fasilitas pelayanan yang disediakan dan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada untuk kelancaran dan kenyamanan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	(Jumlah sarpras yang disediakan atau dipelihara/jumlah sarpras standar pelayanan) x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.02.2.02.000 1 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada	Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan memuat dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat memuat SOP, SP, IKM, ISO	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan pada tahun berjalan	2	2	1.505.00 0,00	2	1.505.00 0,00	2	1.505.00 0,00	2	1.505.00 0,00	2	1.505.0 00,00	10	7.525.0 00,00		

[illegible]

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
			trantibum dan sosial sesuai Permendagri No. 100 tahun 2018																
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir	usulan masyarakat yang terakomodir adalah usulan yang disampaikan pada kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan yang terakomodir pada daftar skala prioritas	(jumlah usulan yang terakomodir/jumlah seluruh usulan) x 100%	100	100	2.096.41 7.277,00	100	2.096.41 7.277,00	100	2.096.41 7.277,00	100	2.096.41 7.277,00	100	2.096.4 17.277, 00	100	10.482. 086.385 ,00	7.01.0.00. 0.00.02.0 007 - Kelurahan Tanjungsari	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	100	100		100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02.000 1 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang adalah masyarakat yang hadir dan berpartisipasi mengikuti kegiatan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir pada kegiatan musrenbang pada tahun berjalan	7	7	40.961.6 00,00	7	40.961.6 00,00	7	40.961.6 00,00	7	40.961.6 00,00	7	40.961. 600,00	35	204.808 .000,00		
7.01.03.2.02.000 2 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan / pemeliharaan sarpras lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara adalah sarpras lingkungan yang di usulkan dan terakomodir untuk di bangun/dipelihara	Jumlah titik sarpras lingkungan yang dibangun/dipelihara	7	7	1.505.00 0.000,00	7	1.505.00 0.000,00	7	1.505.00 0.000,00	7	1.505.00 0.000,00	7	1.505.0 00.000, 00	35	7.525.0 00.000, 00		
7.01.03.2.02.000 3 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan pada seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	7	7	550.455. 677,00	7	550.455. 677,00	7	550.455. 677,00	7	550.455. 677,00	7	550.455 .677,00	35	2.752.2 78.385, 00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	(Kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan/Kegiatan pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya dilaksanakan)x 100%	100	100	87.439.2 00,00	100	87.439.2 00,00	100	87.439.2 00,00	100	87.439.2 00,00	100	87.439. 200,00	100	437.196 .000,00		
7.01.03.2.03.000 2 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya fasilitasi lembaga masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga masyarakat yang difasilitasi dengan anggaran pada Seksi Ekokesra	Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi pada tahun berjalan	7	7	73.168.8 00,00	7	73.168.8 00,00	7	73.168.8 00,00	7	73.168.8 00,00	7	73.168. 800,00	35	365.844 .000,00		
7.01.03.2.03.000 4 - Fasilitasi	Terlaksananya pemberdaayaa	Jumlah Laporan Fasilitasi	laporan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat adalah laporan kegiatan	Jumlah laporan pemberdayaan	1	1	14.270.4 00,00	1	14.270.4 00,00	1	14.270.4 00,00	1	14.270.4 00,00	1	14.270. 400,00	5	71.352. 000,00		

BIDANG URUSAN /TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANG KAT DAERAH	KETE RANG AN
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE			
						TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-15	-16	-17	-18
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	n kesejahteraan masyarakat	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	yang dilaksanakan pada seksi perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	kesejahteraan masyarakat pada tahun berjalan															

Sumber : Kecamatan Sukorejo, 2025

Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
1	Pembangunan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur kota yang ramah publik dan lingkungan	Outcome program : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
		Output Kegiatan : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Output sub kegiatan : Terlaksananya pembangunan/pemeliharaan sarpras lingkungan	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
2	Optimalisasi program RT KEREN menjadi KARYA MAS (Kelurahan Berdaya Menuju Kota Masa Depan) dengan meningkatkan kemanfaatan bagi warga masyarakat	Outcome program : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
		Output Kegiatan : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Output sub kegiatan 1 : Terlaksananya pembangunan/pemeliharaan sarpras lingkungan	1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
		Output sub kegiatan 2 : Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
3	Penguatan peran kampung wisata dan membangun objek wisata baru	Outcome program : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
		Output Kegiatan : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Output sub kegiatan : Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
4	Normalisasi Drainase Perkotaan, Normalisasi Sungai untuk peningkatan fungsi irigasi dan Sanitasi Perkotaan	Outcome program : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
		Output Kegiatan :	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
5	Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif		
		Output sub kegiatan : Terlaksananya pembangunan/ pemeliharaan sarpras lingkungan	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
		Outcome program : Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
		Output Kegiatan : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang partisipatif	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Output sub kegiatan : Terlaksananya pembangunan/ pemeliharaan sarpras lingkungan	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	

Sumber : Kecamatan Sukorejo, 2025

4.2 . Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukorejo

[illegible]

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Base line	Target Tahun							Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
		kinerja koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan berdasarkan PP no. 17 tahun 2018 Status kinerja kecamatan diperoleh dari evaluasi Provinsi Jawa timur											
3.	Persentase kelurahan dengan tingkat perkembangan "cepat berkembang"	Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan adalah penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan melalui isian formulir evaluasi diri yang ada didalam aplikasi epdeskel berdasarkan Permendagri no. 81 tahun 2015 evaluasi epdeskel terdiri dari 3 kategori yaitu kelurahan dengan tingkat perkembangan "kurang berkembang", "berkembang" dan "cepat berkembang" dengan kategori tertinggi adalah "cepat berkembang"	(Jumlah kelurahan dengan tingkat perkembangan "cepat berkembang" dibagi jumlah seluruh kelurahan) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Kecamatan Sukorejo, 2025

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahunan							Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
NIHIL													

Sumber : Kecamatan Sukorejo, 2025

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD, adalah perencanaan Satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) tahun. Perubahan Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama Tahun 2025 – 2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar. Renstra dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Selain itu, Renstra dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Renstra Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penjabaran visi dan misi, maka partisipasi dan komitmen seluruh aparatur Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Perlu disampaikan bahwa Renstra ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanaan pembangunan di Kota Blitar, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Renstra membutuhkan kecermatan, kreatifitas, dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar maka perubahan rencana strategis ini akan dilakukan penyesuaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 ini menjadi acuan kerja bagi seluruh struktur organisasi dilingkungan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan proses penting dalam rangka menerjemahkan visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan sektoral yang operasional. Terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra PD, antara lain:

1. Keterpaduan dan Konsistensi

Renstra PD harus selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJPD, RPJMD, dan Renstra Kementerian/Lembaga terkait, agar terdapat kesinambungan antara perencanaan pusat, daerah, dan perangkat daerah.

2. Berbasis Data dan Analisis yang Akurat

Seluruh perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja harus didasarkan pada data yang valid, terukur, serta analisis permasalahan yang komprehensif.

3. Berorientasi Hasil (Outcome-Oriented)

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun harus mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sebatas menghasilkan output administratif.

4. **Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi**

Renstra PD harus memuat indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, indikator kinerja kegiatan, serta indikator SPM yang jelas sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja.

5. **Fleksibilitas terhadap Dinamika Lingkungan Strategis**

Perubahan kebijakan nasional, dinamika sosial-ekonomi, serta potensi bencana dan kedaruratan harus diantisipasi melalui strategi adaptif yang memungkinkan penyesuaian Renstra PD secara tepat.

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah perlu berlandaskan pada sejumlah kaidah agar dokumen ini benar-benar dapat menjadi pedoman strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Adapun kaidah-kaidah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Keterpaduan**

Pelaksanaan Renstra PD harus selaras dengan RPJPD, RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga terkait, serta kebijakan pembangunan nasional, sehingga tercapai keselarasan perencanaan pembangunan antarlevel pemerintahan.

2. **Konsistensi**

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra PD, sehingga arah pencapaian kinerja dapat terjaga.

3. **Efektivitas dan Efisiensi**

Pelaksanaan Renstra PD perlu memastikan bahwa sumber daya pembangunan (anggaran, SDM, dan sarana-prasarana) digunakan secara tepat, hemat, dan berdaya guna, dengan mengutamakan hasil (*outcome*) yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

4. **Akuntabilitas dan Transparansi**

Setiap tahapan pelaksanaan Renstra PD wajib dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi proses maupun hasil, dengan penyajian data, informasi, dan capaian kinerja yang terbuka serta dapat diakses publik.

5. **Berorientasi Hasil (Result-Oriented)**

Implementasi Renstra PD harus diarahkan pada pencapaian *outcome* dan *impact* yang terukur, bukan sekadar pada penyelesaian output administratif.

6. **Fleksibilitas dan Responsif terhadap Perubahan**

Mengingat dinamika lingkungan strategis yang cepat (perubahan regulasi, kondisi sosial-ekonomi, maupun keadaan darurat/bencana), pelaksanaan Renstra PD harus memungkinkan adanya penyesuaian strategi secara adaptif.

7. **Partisipatif dan Inklusif**

Pelaksanaan Renstra PD perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun tidak hanya menjadi dokumen perencanaan strategis, tetapi juga pedoman operasional bagi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama periode lima tahun ke depan. Agar Renstra dapat diimplementasikan secara konsisten dan terukur, maka diperlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. **Penjabaran ke dalam Dokumen Perencanaan Tahunan**

Renstra PD akan diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya, yang kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penganggaran dalam

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

2. **Penyusunan Perjanjian Kinerja**

Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKKc), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tercantum dalam Renstra akan dijadikan dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja kepala perangkat daerah dengan kepala daerah, sehingga arah kinerja dapat lebih terukur dan terikat secara formal.

3. **Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev)**

Dibangun sistem monitoring dan evaluasi secara periodik untuk menilai capaian program dan kegiatan sesuai indikator yang ditetapkan, sekaligus menjadi umpan balik bagi penyempurnaan perencanaan di tahun-tahun berikutnya.

4. **Pelaporan Akuntabilitas Kinerja**

Hasil pelaksanaan Renstra PD akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya, yang memuat capaian indikator, analisis pencapaian, serta rekomendasi perbaikan kinerja.

5. **Penyesuaian terhadap Perubahan Kebijakan dan Kondisi Lingkungan Strategis**

Apabila terdapat perubahan kebijakan nasional, peraturan perundangan, maupun dinamika sosial-ekonomi, Renstra PD dapat dilakukan penyesuaian melalui mekanisme *review* Renstra atau perubahan Renstra sesuai ketentuan yang berlaku.